



***PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk
DAN ENTITAS ANAK***

Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
31 Maret 2024 (Tidak Diaudit) dan
31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)



**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

**Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
31 Maret 2024 (Tidak Diaudit) dan
31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Interim	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Interim	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian Interim	5
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim	6

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
31 MARET 2024 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2023 (DIAUDIT)
SERTA UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---|--|
| 1. Nama | : Daniel Nainggolan |
| Alamat kantor | : Jl. Lodan Timur No. 7 Gedung Ecovention
Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara |
| Nomor Telepon | : (021) 6453456-6454567 |
| Alamat domisili sesuai KTP
atau kartu identitas lain | : Jl. Cereme 38 Cilandak RT/RW 005/003
Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak
Jakarta Selatan |
| Jabatan | : Direktur |

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 April 2024

Direktur



(Daniel Nainggolan)

Handwritten initials or mark.

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Maret 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3, 38, 42	282.505	411.446
Piutang Usaha			
Pihak Berelasi	4, 38, 42	3.347	9.531
Pihak Ketiga	4, 42	38.055	52.706
Piutang Lain-lain	5,42		
Pihak Berelasi		--	17.781
Pihak Ketiga		5.369	8.296
Persediaan	6	6.186	6.057
Uang Muka	7	7.768	1.777
Pajak Dibayar di Muka	8.a	16.872	4.518
Biaya Dibayar di Muka	10	18.304	4.596
Aset Lain-lain		2.573	2.573
Jumlah Aset Lancar		380.979	519.281
ASET TIDAK LANCAR			
Uang Muka		--	3.536
Aset Pajak Tangguhan	8.d	579	579
Investasi pada Ventura Bersama	11	5.843	5.815
Investasi pada Entitas Asosiasi	12	29.591	29.596
Investasi Jangka Panjang Lainnya	13, 42	128.936	128.936
Aset Real Estat	14	276.235	280.043
Properti Investasi	15	204.433	206.274
Aset Tetap	16	2.469.550	2.455.802
Aset Hak Guna	17	67.713	78.963
Aset Lain-lain	18	31.232	34.595
Jumlah Aset Tidak Lancar		3.214.112	3.224.139
JUMLAH ASET		3.595.091	3.743.420

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Tanggal 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Maret 2024	31 Desember 2023
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha			
Pihak Berelasi	19, 38, 42	840	840
Pihak Ketiga	19	18.373	11.327
Utang Lain-lain - Pihak Ketiga		19.858	15.422
Utang Pajak	8.b	127.226	141.705
Beban Akrual dan Provisi	21, 42	211.000	218.363
Liabilitas Jangka Panjang yang			
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			
Utang Bank		230.599	40.919
Liabilitas Sewa	17	4.958	3.126
Utang Obligasi	23, 42	--	149.568
Pendapatan Diterima di Muka dan Uang Muka Pelanggan	24	114.793	116.695
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		727.647	697.965
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi			
Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			
Utang Bank	22, 42	467.539	617.196
Utang Obligasi	23, 42	65.263	65.213
Pendapatan Diterima di Muka dan Uang Muka Pelanggan	24	307.475	289.638
Liabilitas Sewa	17	84.685	97.079
Liabilitas Pajak Tangguhan	8.d	146.686	145.863
Jaminan Pelanggan dan Deposit Lainnya	25	15.689	13.397
Liabilitas Imbalan Kerja	26	150.190	148.829
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.237.527	1.377.215
JUMLAH LIABILITAS		1.965.174	2.075.180
EKUITAS			
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA			
PEMILIK ENTITAS INDUK			
Modal Saham			
Modal Dasar sebesar 5.759.999.998			
saham terdiri dari 1 saham seri A, 1 saham seri B dengan nilai nominal			
masing-masing Rp500 (Rupiah penuh) per saham serta 5.759.999.996 saham			
seri C dengan nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar			
1.599.999.998 saham terdiri dari 1 saham seri A, 1 saham seri B			
dan 1.599.999.996 saham seri C	27	400.000	400.000
Tambahan Modal Disetor	28.a	40.404	40.404
Saldo Laba			
Ditentukan Penggunaannya		44.810	42.458
Belum Ditentukan Penggunaannya		1.258.847	1.299.242
Komponen Ekuitas Lainnya	28.b	(134.944)	(134.944)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan		1.609.117	1.647.160
kepada Pemilik Entitas Induk		1.609.117	1.647.160
Kepentingan Nonpengendali	29	20.800	21.080
JUMLAH EKUITAS		1.629.917	1.668.240
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		3.595.091	3.743.420

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM
 Untuk Periode Tiga Bulan Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Maret	
		2024	2023
PENDAPATAN USAHA	30, 38	255.650	260.347
Beban Pokok Pendapatan	31	(12.417)	(7.239)
Beban Langsung	31	(130.718)	(110.109)
Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung		(143.135)	(117.348)
LABA BRUTO		112.515	142.999
Pendapatan Bunga		4.221	4.761
Pendapatan Lainnya	33	4.480	8.637
Keuntungan Penjualan Aset Tetap - Bersih	16	--	53
Beban Umum dan Administrasi	32	(60.187)	(53.876)
Beban Penjualan	32	(3.144)	(3.374)
Kerugian Selisih Kurs - Bersih		(48)	(3)
Beban Lain-lain	34	(7.820)	(3.116)
Jumlah Beban Usaha		(62.498)	(46.918)
LABA USAHA		50.017	96.081
Bagian Laba (Rugi) Bersih Entitas Asosiasi	12	(5)	104
Bagian Rugi Bersih Investasi Ventura Bersama	11	28	--
Beban Keuangan	35	(21.401)	(23.803)
Beban Pajak Final	9	(6.071)	(2.848)
LABA SEBELUM PAJAK		22.568	69.534
Beban Pajak Penghasilan	8.c.d	(9.828)	(24.849)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN		12.740	44.685
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		--	--
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		12.740	44.685
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk		13.020	44.980
Kepentingan Nonpengendali	29	(280)	(295)
JUMLAH		12.740	44.685
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk		13.020	44.980
Kepentingan Nonpengendali	29	(280)	(295)
JUMLAH		12.740	44.685
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah Penuh)	36	8	28

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk Periode Tiga Bulan Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk									
Catatan	Modal Disetor	Tambahkan Modal Disetor		Saldo Laba		Komponen Ekuitas Lainnya	Jumlah	Kepentingan Nonpengendali	Jumlah Ekuitas
		Agio Saham	Selisih antara Aset dan Liabilitas	Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya *)				
Saldo per 31 Desember 2022	400.000	36.709	3.695	40.916	1.144.401	(79.755)	1.545.966	14.963	1.560.929
Laba Bersih Periode Berjalan	--	--	--	--	44.980	--	44.980	(295)	44.685
Saldo per 31 Maret 2023	400.000	36.709	3.695	40.916	1.189.381	(79.755)	1.590.946	14.668	1.605.614
Pembentukan Cadangan Umum	37	--	--	1.542	(1.542)	--	--	--	--
Dividen	37	--	--	--	(46.400)	--	(46.400)	--	(46.400)
Laba Bersih Tahun Berjalan	--	--	--	--	235.173	--	235.173	6.133	241.306
Kerugian Komprehensif Lain Tahun Berjalan	--	--	--	--	(32.390)	(55.189)	(87.579)	(16)	(87.595)
Saldo per 31 Desember 2023	400.000	36.709	3.695	42.458	1.299.242	(134.944)	1.647.160	21.080	1.668.240
Pembentukan Cadangan Umum	37	--	--	2.352	(2.352)	--	--	--	--
Dividen	37	--	--	--	(51.063)	--	(51.063)	--	(51.063)
Laba Bersih Periode Berjalan	--	--	--	--	13.020	--	13.020	(280)	12.740
Saldo per 31 Maret 2024	400.000	36.709	3.695	44.810	1.258.847	(134.944)	1.609.117	20.800	1.629.917

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk Periode Tiga Bulan Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Maret	
		2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Pelanggan		299.485	257.611
Pembayaran kepada Pemasok dan Pihak Ketiga		(177.272)	(66.102)
Pembayaran kepada Karyawan		(52.749)	(35.577)
Kas Dihasilkan dari Operasi		69.464	155.932
Pendapatan Bunga		4.221	4.724
Pembayaran Pajak		(8.800)	(2.848)
Pembayaran Beban Bunga dan Keuangan		(21.008)	(19.986)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		43.877	137.822
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan Aset Tetap	16	(34.864)	(32.365)
Perolehan Aset Takberwujud	18	(2.220)	(636)
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi		17.785	2.000
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(19.299)	(31.001)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Utang Bank	22	50.000	--
Pembayaran Dividen	37	(51.063)	--
Pembayaran Utang Obligasi	23	(149.600)	--
Pembayaran Liabilitas Sewa	17	(2.856)	--
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(153.519)	--
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(128.941)	106.821
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		411.446	506.061
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE		282.505	612.882

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM**

Untuk Periode Sembilan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

1.a. Pendirian Perusahaan

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 10 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Notaris pengganti Achmad Abid, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian telah diperbaharui dengan Akta No. 98 tanggal 22 Agustus 1992 dan Akta No. 134 tanggal 8 September 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian dan perubahan ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. C2-7514.HT.01.01. TH.92 tanggal 11 September 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95, tanggal 27 Nopember 1992, Tambahan No. 6071. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta Notaris No. 90 tanggal 24 Agustus 2020 dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-0158739.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 21 September 2020.

Pada awalnya, dalam rangka pengembangan kawasan Ancol sebagai kawasan wisata terpadu, pada tahun 1966, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemda DKI) menunjuk PT Pembangunan Ibu Kota Jakarta Raya (PT Pembangunan Jaya) sebagai Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Ancol (BPP Ancol) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya No. 1b/3/1/26/1966 tanggal 19 Oktober 1966. Pada tahun 1966, Perusahaan memulai kegiatan operasinya secara komersial. Pada tanggal 10 Juli 1992, status BPP Ancol diubah menjadi suatu badan hukum, yaitu menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol, dengan komposisi kepemilikan sahamnya adalah Pemda DKI sebesar 80% dan PT Pembangunan Jaya sebesar 20%.

Sesuai dengan pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, antara lain dapat bertindak sebagai pengembang, pemborong pada umumnya, dan pengembang wilayah pemukiman;
- Menjalankan usaha di bidang jasa, yaitu konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Pada saat ini Perusahaan dan Entitas Anak ("Grup") berusaha dalam bidang:

- Real estat, yaitu pembangunan, penjualan dan penyewaan bangunan dan penjualan tanah kaveling;
- Pariwisata, termasuk mengelola taman bermain dan arena rekreasi, pasar seni dan dermaga.

Perusahaan tergabung dalam Jaya Grup. PT Pembangunan Jaya merupakan pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perusahaan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan entitas induk utamanya.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Gedung Ecovention, Jl. Lodan Timur No. 7 Kel. Ancol Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

1.b. Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Akta No. 01/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 dari Notaris Aulia Taufani S.H., susunan pengurus Perusahaan masing-masing pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

		31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023	
Komisaris Utama	:	Sofyan A. Djalil *)	
Komisaris	:	Yohannes Henky Wijaya Suhardi Alius	

*) Merangkap sebagai Komisaris Independen

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023

Direktur Utama : Winarto
Direktur : Cahyo Satriyo Prakoso
Daniel Nainggolan
Eddy Prastiyo

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan nomor 001/KOM-PJA/III/2023 dan 001/KOMPJA/X/2022, susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023

Ketua : Sofyan A. Djalil
Anggota : Teti Eko Pratiwi
Loso Judijanto

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023

Sekretaris Perusahaan : Agung Praptono Agung Praptono

Ketua Satuan Pengendalian Internal Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023

Ketua : Farida Kusuma R. Farida Kusuma R.

Jumlah karyawan per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah 592 dan 641 karyawan (tidak diaudit).

1.c. Entitas Anak

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan Entitas Anak secara bersama - sama disebut sebagai "Grup".

Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas anak sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Operasi Komersial	Persentase Kepemilikan %	31 Mar 2024		31 Des 2023	
					Jumlah Aset	Jumlah Laba (Rugi) Bersih	Jumlah Aset	Jumlah Laba (Rugi) Bersih
PT Taman Impian Jaya Ancol (PT TIJA)	Jakarta	Pariwisata	1972	99,99	3.120.809	21.312	3.177.022	388.880
PT Seabreeze Indonesia (PT SI)	Jakarta	Pariwisata, Perdagangan dan Jasa	1972	96,57	41.150	(1.092)	42.297	814
PT Jaya Ancol (PT JA)	Jakarta	Pariwisata	2009	100	22.728	39	11.154	(4)
PT Sarana Tirta Utama (PT STU)	Jakarta	Jasa, Penjernihan dan Pengelolaan air bersih, Limbah, Penyaluran dan pendistribusian air bersih	2010	65,00	29.699	(838)	30.603	(3.539)
PT Jaya Ancol Pratama Tol (PT JAPT)	Jakarta	Pembangunan Tol dan Jasa	2011	60,00	29.258	61	29.201	18.354

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Operasi Komersial	Persentase Kepemilikan %	31 Mar 2024		31 Des 2023	
					Jumlah Aset	Jumlah Laba (Rugi) Bersih	Jumlah Aset	Jumlah Laba (Rugi) Bersih
PT Taman Impian (TI)								
	Jakarta	Pariwisata	2012	100	11.091	(20)	10.856	581
PT Genggam Anugerah Lumbung Kuliner	Jakarta	Jasa Konsultan	2012	100	487	(9)	506	(45)

Semua entitas anak berdomisili di Jakarta.

PT TIJA mengelola pintu gerbang, taman dan pantai, dunia fantasi, kolam renang, pertunjukan binatang, penginapan wisata, dan penjualan *merchandise*.

Berdasarkan Akta No. 53 tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham PT TIJA menyetujui untuk menerbitkan 1.179 lembar saham baru nilai nominal seluruhnya senilai Rp117.937, dan sehubungan dengan hal tersebut maka modal ditempatkan dan disetor akan berubah dari sebesar Rp5.721 menjadi Rp6.700. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHUAH. 01.03-0440151 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021.

Modal dasar PT TIJA sebesar Rp689.998 ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 6.899 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (Rupiah penuh) per saham, dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,9999976% atau sebanyak 6.899. saham dengan nilai sebesar Rp689.998.
- PT Pembangunan Jaya memiliki 0,0000024% atau sebanyak 168 saham dengan nilai sebesar Rp16.800 (Rupiah penuh).

PT SI mengelola penginapan wisata dan sarana transportasi di Kepulauan Seribu, restoran, dan penyewaan lahan.

Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 13 Januari 2022 dari Notaris Aulia Taufani, S.H., pemegang saham PT SI menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan menerbitkan 844.214 lembar saham baru dengan nominal seluruhnya sebesar Rp21.105, yang diambil bagian oleh:

- Perusahaan sebesar Rp20.846;
- Tn. Slamet Budisukrisno sebesar Rp9;
- PT TIJA sebesar Rp68; dan
- Tn. Wardiman sebesar Rp182.

Akta perubahan di atas telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHUAH. 01.03-0075810 tanggal 3 Februari 2022.

Dengan demikian, persentase kepemilikan Perusahaan dan PT TIJA pada PT SI berubah menjadi masing-masing sebesar 97,81% dan 0,32%.

PT JA bergerak di bidang pariwisata. Pada tahun 2011, PT JA bersama dengan PT Jaya Konstruksi Pratama Tol mendirikan PT Jaya Ancol Pratama Tol (JAPT) dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 60% dan 40%.

PT STU bergerak di bidang jasa pengelolaan air bersih, khususnya menyelenggarakan penjernihan dan pengelolaan air bersih dan limbah, pengadaan dan penyaluran dan pendistribusian air bersih. Perusahaan bersama dengan PT Jaya Teknik Indonesia (PT JTI) mendirikan PT STU dengan kepemilikan masing-masing sebesar 65% dan 35%.

PT TI bergerak di bidang pariwisata. Pada tahun 2012, PT TIJA bersama dengan PT JA mendirikan PT Taman Impian (PT TI) dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 99% dan 1%.

Berdasarkan akta No.1 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta 1 April 2021, ruang lingkup kegiatan PT GALK adalah jasa konsultasi manajemen. Pada tahun 2014, PT TI mengakuisisi 70% kepemilikan di PT GALK, sebelumnya entitas asosiasi, dan PT JA menambah kepemilikan 5% di

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT GALK sehingga Perusahaan secara tidak langsung memiliki PT GALK 100%. Pada tahun 2021 PT GALK berdasarkan Akta No. 21 tanggal 23 Februari 2021 dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., tentang perubahan anggaran dasar, menyetujui peningkatan modal dasar dari sebesar 3.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000 menjadi 3.820 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.820, yang diambil bagian oleh PT TI sebesar Rp3.629 dan PT JA sebesar Rp191. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0128568. tahun 2021 tanggal 26 Februari 2021.

1.d. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Pada tanggal 22 Juni 2004, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan suratnya No. S-1915/PM/2004 untuk melakukan penawaran umum atas 800.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 2 Juli 2004 saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Pada tanggal 30 Juni 2005, sejumlah saham Perusahaan seri C sejumlah 799.999.998 lembar saham telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 13 April 2006 para pemegang saham memutuskan pemecahan nilai nominal setiap saham seri C dari Rp500 menjadi Rp250 per saham. Sehingga jumlah saham seri C berubah menjadi 1.599.999.996 lembar saham.

1.e. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Perusahaan juga telah menerbitkan obligasi dengan jumlah nilai masing-masing sebesar Rp731.000 pada tahun 2021, Rp269.000 pada tahun 2019 serta Rp1.000.000 pada tahun 2018 dan 2016 yang dibagi atas 4 (empat) seri obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Obligasi	Jumlah (Rp Juta)	Tingkat Bunga	Pemeringkat	Peringkat	Tenor	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Status
1	Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I Tahun 2016								
	Seri A	250.000	8,10%	PEFINDO	id AA-	3 Tahun	20-Sep-16	29-Sep-19	Lunas
	Seri B	50.000	8,20%	PEFINDO	id AA-	5 Tahun	20-Sep-16	29-Sep-21	Lunas
2	Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap II Tahun 2018								
	Seri A	350.000	6,30%	PEFINDO	id AA-	370 Hari	18-Mei-18	23-Mei-19	Lunas
	Seri B	350.000	7,60%	PEFINDO	id AA-	3 Tahun	18-Mei-18	18-Mei-21	Lunas
3	Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap I Tahun 2019	269.000	7,85%	PEFINDO	id A+	370 Hari	02-Juli-19	12-Juli-20	Lunas
4	Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021								
	Seri A	516.000	7,25%	PEFINDO	id A	370 Hari	10-Feb-21	20-Feb-22	Lunas
	Seri B	149.600	8,90%	PEFINDO	id A	3 Tahun	10-Feb-21	10-Feb-24	Lunas
	Seri C	65.400	9,60%	PEFINDO	id A	5 Tahun	10-Feb-21	10-Feb-26	Belum Lunas

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten ataupun perusahaan publik.

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Periode Berjalan

Pada tanggal 1 Januari 2024, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan revisi tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- i. PSAK 201: Penyajian Laporan
- ii. PSAK 116: Sewa
- iii. PSAK 207: Laporan Arus Kas dan PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada (Catatan 1.c).

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan, yakni Perusahaan terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh.

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian
- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

2.e. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas palapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai entitas induk utama.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

2.f. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuanganyang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan menggunakan dua dasar yaitu: model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari asset keuangan.

- (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi
Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:
- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
 - (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika asset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

- (ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset keuangan diukur pada FVTOCI ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

- (iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- (a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- (b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- (c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - (i) Jumlah penyisihan kerugian dan
 - (ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 115.
- (d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- (a) Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau
- (b) Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrument keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- (i) Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- (ii) Nilai waktu uang; dan
- (iii) Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrument keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Grup menggunakan metode *roll rate* untuk mengukur penurunan nilai piutang usaha.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Jika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka diperlukan untuk menerapkan reklasifikasi secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi. Keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai) atau bunga yang sebelumnya diakui tidak disajikan kembali.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTPL, maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perbedaan antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajarnya diakui dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, jika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTPL menjadi biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi menjadi nilai tercatat bruto baru.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain. Tingkat suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit yang diharapkan tidak disesuaikan sebagai hasil dari reklasifikasi. Sebaliknya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTOCI menjadi biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan tersebut direklasifikasi ke nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Namun, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihilangkan dari ekuitas dan disesuaikan dengan nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur dengan cara yang sama seperti biaya perolehan diamortisasi.

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling dihapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1).
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2).
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Grup pada akhir tahun pelaporan dimana perpindahan terjadi.

2.g. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- (a) jika investasi menjadi entitas anak.
- (b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
- (c) ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

2.h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas tunai, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.i. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP). Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

2.j. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya sebagian akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka. Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

2.k. Aset Real Estat

Aset real estat berupa tanah kosong, tanah hasil pengembangan, tanah reklamasi, rumah tinggal, rumah kantor, rumah toko dan apartemen dinilai berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata. Biaya perolehan rumah tinggal dan rumah tinggal dalam penyelesaian meliputi seluruh biaya konstruksi bangunan, diluar biaya perolehan tanah. Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembelian tanah mentah, pematangan dan pengembangan tanah, perijinan dan jasa konsultasi. Biaya pinjaman atas pinjaman yang digunakan untuk membiayai perolehan aset dikapitalisasi dalam harga perolehan aset real estat selama masa konstruksi.

Biaya yang tidak terhubung secara langsung dengan suatu proyek real estat, seperti biaya umum dan administrasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Biaya yang telah dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat dialokasi ke setiap unit real estat dengan menggunakan metode identifikasi khusus yang diterapkan secara konsisten.

Biaya pinjaman yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan dikapitalisasi ke proyek pengembangan. Kapitalisasi dihentikan pada proyek pengembangan tersebut apabila secara substantial telah siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya atau aktivitas pembangunan ditunda atau ditangguhkan dalam suatu periode yang cukup lama.

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2.l. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan serta sarana dan prasarana disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran umur manfaat aset Properti Investasi.

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20-50
Sarana dan Prasarana	5-30

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

2.m. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan estimasi kerugian penurunan nilai. Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat aset tetap, sebagai berikut:

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Tahun</u>
<u>Kepemilikan Langsung</u>	
Bangunan	20 - 50
Sarana dan Prasarana	5 - 30
Mesin dan Peralatan	5 - 40
Perabotan dan Perlengkapan Kantor	5
Alat Transportasi (Kendaraan)	5
Kapal	8
Binatang	5-25
Aset Hak-Guna	5-21

Pada tahun 2018, Grup menelaah estimasi masa manfaat ekonomis untuk bangunan, sarana dan prasarana, dan mesin dan perlengkapan yang umurnya dapat diestimasi secara andal, yakni berdasarkan kegunaan yang diperkirakan oleh Grup.

Penelaahan atas estimasi masa manfaat ekonomis Grup dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Asrori & Rekan, Penilai Publik Independen, yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan No. 2.15.00126 dengan laporannya No. 00251/FR-AS/TIJA/Studi/IX/2018.

Perubahan ini diterapkan secara prospektif sesuai dengan PSAK 208 (Revisi 2024).

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir tahun pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan berdasarkan kondisi teknis dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

2.n. Aset Lain-lain

Akun-akun yang tidak dapat digolongkan dalam aset lancar, investasi, maupun aset takberwujud disajikan dalam aset lain-lain.

2.o. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus. Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sebagai berikut:

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Tahun</u>
Perangkat Lunak Komputer	5
Lisensi	1-5
Hak Atas Tanah	20

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat aset takberwujud dengan umur tak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Aset takberwujud dengan umur tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa aset takberwujud mungkin mengalami penurunan nilai.

2.p. Penurunan Nilai Aset

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

2.q. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

1) Operasi Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- (a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- (b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- (c) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
- (d) Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

(e) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

2) Ventura Bersama

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai *venturer* bersama.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

2.r. Biaya Emisi Saham

Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

2.s. Biaya Emisi Obligasi

Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi bersih obligasi. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan.

2.t. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
 - Perusahaan bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
 - Kontrak memiliki substansi komersial;
 - Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang dapat diakui jumlah pendapatan yang dapat diakui pelaksanaan.

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi sepanjang waktu:

- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- Pelaksanaan Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Pelaksanaan Grup tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk pelaksanaan yang diselesaikan hingga saat ini.

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual), kecuali merupakan aset yang terkait dengan aktivitas kontrak masa depan.

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan dicatat sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

2.u. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

2.v. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

2.w. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir tahun pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir tahun pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir tahun pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.x. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masih harus dibayarkan oleh Grup sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Grup untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Grup.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak yang diakui, Grup telah mengungkapkan dalam laporan keuangannya:

- a. Tanggal SKPP,
- b. Jumlah yang diakui sebagai Aset Pengampunan Pajak sesuai SKPP,
- c. Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas Pengampunan Pajak.

2.y. Sewa

Grup Sebagai Penyewa (Lessee)

Pada tanggal insepisi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Grup menilai apakah:

- (a) Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substantial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- (b) Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- (c) Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan aset digunakan telah ditentukan mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
 - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal insepisi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks utang sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalty penghentian jika Grup cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna dengan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar, yang mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset hak-guna disusutkan dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan. Umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Setelah tanggal permulaan, Perusahaan mengukur liabilitas sewa dengan:

- (a) Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
- (b) Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar;
- (c) Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revision.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Perusahaan atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Perusahaan mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang termasuk ke dalam pengecualian, yakni pembayaran atas sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui pada metode garis lurus dan dibebankan pada laba rugi. Pembayaran sewa terkait dengan sewa yang dikecualikan tersebut diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Grup Sebagai Lessor

Grup mengakui asset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodic yang konstan atas investasi neto Grup sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.

Grup menyajikan aset sebagai sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat asset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat dari asset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjen, apabila ada, diakui

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

2.z. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

Estimasi Umur Manfaat

Grup melakukan penelaahan atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi atas perubahan estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor tersebut (lihat Catatan 15 untuk nilai tercatat Properti Investasi dan Catatan 16 untuk nilai tercatat aset tetap).

Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja. Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir pelaporan, dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasi dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup menilai penurunan nilai pada asset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan *roll rate* dan *discounted cash flow* untuk menilai kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain. Nilai tercatat aset keuangan telah diungkapkan dalam Catatan 3, 4, dan 5.

Pajak Penghasilan

Menentukan provisi atas pajak penghasilan badan mewajibkan pertimbangan signifikan oleh manajemen. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan (Catatan 8).

Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui bila Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah diakui sebagai provisi merupakan taksiran terbaik yang diharuskan menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian yang melekat pada kewajiban tersebut. Provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan kewajiban kini dengan jumlah tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas tersebut.

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Bila beberapa atau keseluruhan dari manfaat ekonomis mengharuskan penyelesaian provisi diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian tagihan dapat diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

2.ab. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam satu tahun.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar untuk perhitungan laba per saham dasar adalah sebesar 1.599.999.998 untuk tahun 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021.

2.ac. Informasi Segmen

Sebuah segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas di dalam Grup.

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. Kas dan Setara Kas

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Kas	924	935
Bank		
Rupiah		
Pihak Berelasi		
PT Bank DKI (Catatan 38)	30.663	10.143
Pihak Ketiga		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.308	17.982
PT Bank Central Asia Tbk	4.359	3.537
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.854	10.839
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.244	766
PT Bank Permata Tbk	1.145	1.135
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	209	209
	45.782	44.611
Deposito Berjangka		
Rupiah		
Pihak Berelasi		
PT Bank DKI (Catatan 38)	224.899	355.000
Pihak Ketiga		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.900	9.900
PT Bank Permata Tbk	1.000	1.000
	235.799	365.900
Jumlah Kas dan Setara Kas	282.505	411.446
Tingkat Suku Bunga Kontraktual		
Deposito Berjangka Per Tahun (%)	2,25% - 6,25%	2,25% - 6,55%
Jangka Waktu	1 bulan	1 bulan - 3 Bulan

4. Piutang Usaha

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Pihak Berelasi (Catatan 38)	3.347	9.531
Pihak Ketiga	105.507	113.789
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(67.452)	(61.083)
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih	38.055	52.706
Jumlah Bersih	41.402	62.237

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (hari) adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Belum Jatuh Tempo	6.162	12.581
Sudah Jatuh Tempo		
1 - 30 hari	9.958	15.372
31 - 60 hari	9.609	3.579
61 - 90 hari	4.107	3.189
> 91 hari	79.018	88.599
Jumlah	<u>108.854</u>	<u>123.320</u>
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(67.452)	(61.083)
Jumlah Bersih	<u>41.402</u>	<u>62.237</u>

Manajemen telah membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan penilaian secara kelompok atas masing-masing debitur.

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Saldo Awal	61.083	47.853
Penambahan (Catatan 34)	6.369	25.050
Pemulihan (Catatan 33)	--	(11.820)
Saldo Akhir	<u>67.452</u>	<u>61.083</u>

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai diatas cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

5. Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Nil dan Rp17.781, piutang lain-lain pihak berelasi merupakan piutang pembagian dividen PT Jakarta Akses Tol Priok (Catatan 12).

Saldo piutang lain-lain pihak ketiga pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp5.369 dan Rp8.296.

Piutang lain-lain pihak ketiga merupakan piutang sponsor dan *tenant* yang belum ditagihkan dan akrual pendapatan bunga.

Manajemen berkeyakinan seluruh bahwa piutang lain-lain dapat tertagih, sehingga manajemen tidak mencadangkan penurunan nilai piutang lain-lain pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang lain-lain.

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

6. Persediaan

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Suku Cadang	3.718	3.762
Barang Dagangan	1.263	1.026
Makanan dan Minuman	1.233	1.249
<i>Supplies</i>	335	399
Minyak Pelumas	77	61
Sub Jumlah	6.626	6.497
<i>Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan</i>	(440)	(440)
Jumlah	6.186	6.057

Persediaan Grup terdiri dari persediaan dengan tingkat perputaran cepat (*fast moving*), antara lain persediaan suku cadang, makanan dan minuman, alat-alat tulis dan kerja, barang dagangan, serta minyak pelumas.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai persediaan.

7. Uang Muka

Saldo uang muka pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7.768 dan Rp1.777.

Uang muka terdiri dari uang muka operasional atas pelaksanaan proyek dan kegiatan usaha atau acara-acara yang diselenggarakan, dan uang muka pesangon karyawan atas pembayaran di muka (1 tahun sebelum masa pensiun) kepada karyawan sebesar 50% dari jumlah pesangon yang akan diterima karyawan.

8. Perpajakan

a. Pajak Dibayar di Muka

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai	462	--
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 (2)	10.810	1.290
Pasal 23	10	--
Entitas Anak		
Pajak Hiburan	3.227	3.227
Pajak Pertambahan Nilai	227	--
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 (2)	2	1
Pasal 22	11	--
Pasal 23	218	--
Pasal 25	1.905	--
Jumlah	16.872	4.518

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

b. Utang Pajak

	<u>31 Maret 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai	--	654
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 (2)	1.153	3.202
Pasal 21	2.486	9.223
Pasal 23	86	181
Pasal 26	137	
Sub Jumlah	<u>3.862</u>	<u>13.260</u>
Entitas Anak		
Pajak Hiburan	4.127	12.478
Pajak Pertambahan Nilai	5.483	5.165
Pajak Pembangunan	751	1.402
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 (2)	5.322	7.718
Pasal 21	1.235	4.395
Pasal 23	208	457
Pasal 26	404	--
Pasal 29	105.834	96.830
Sub Jumlah	<u>123.364</u>	<u>128.445</u>
Jumlah	<u>127.226</u>	<u>141.705</u>

c. Pajak Kini

	<u>31 Maret</u>	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Perusahaan		
Pajak Kini	--	154
Pajak Tangguhan	--	--
Jumlah	<u>--</u>	<u>154</u>
Entitas Anak		
Pajak Kini	(9.005)	(21.859)
Pajak Tangguhan	(823)	(3.144)
Jumlah	<u>(9.828)</u>	<u>(25.003)</u>
Konsolidasian		
Pajak Kini	(9.005)	(21.705)
Pajak Tangguhan	(823)	(3.144)
Jumlah	<u>(9.828)</u>	<u>(24.849)</u>

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan
 komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	31 Maret	
	2024	2023
Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	22.568	69.534
Eliminasi dan Penyesuaian	(84.252)	(23.622)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Induk	(61.684)	45.912
Bagian Laba dan Beban yang telah Dikenakan Pajak yang Bersifat Final	38.271	7.812
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(23.413)	53.724
Koreksi Fiskal		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	(8.913)	(1.261)
Manfaat Karyawan	6.745	2.406
Bonus dan Tantiem	(3.999)	1.107
Jamuan Tamu dan Sumbangan	4.189	1.361
Penghargaan Karyawan	243	123
Penghasilan Bunga	(5.620)	(1.766)
Lain-lain	74.675	(66.107)
Jumlah Koreksi Fiskal	67.320	(64.137)
Laba (Rugi) Fiskal	43.907	(10.413)

Penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak
 yang berlaku adalah sebagai berikut:

	31 Maret	
	2024	2023
Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	22.568	69.352
Bagian Laba (Rugi) Bersih Entitas Anak, Asosiasi dan Ventura Bersama		--
Eliminasi dan Penyesuaian	(84.252)	(23.622)
Bagian Laba dan Beban yang telah Dikenakan Pajak yang Bersifat Final	38.271	7.812
Laba Sebelum Pajak Perusahaan	(23.413)	53.542
Tarif Pajak 22%	(5.151)	11.779
Koreksi Fiskal	14.810	(14.110)
Rugi Fiskal Tidak Dimanfaatkan	6.109	2.331
Beban Pajak Kini Perusahaan	15.768	--

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

d. Pajak Tangguhan

Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	31 Des 2023	Dibebankan ke Laba Rugi	Dibebankan ke Pendapatan Komprehensif Lain	31 Mar 24
Aset Pajak Tangguhan				
PT SI	579	--	--	579
PT TI	--	--	--	--
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	579	--	--	579
Liabilitas Pajak Tangguhan				
PT TIJA	(143.736)	(823)	--	(144.559)
PT STU	(2.127)	--	--	(2.127)
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	(145.863)	(823)	--	(146.686)
	31 Des 2022	Dibebankan ke Laba Rugi	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain	31 Des 2023
Aset Pajak Tangguhan				
PT SI	568	(230)	241	579
PT TI	--	--	--	--
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	568	(230)	241	579
Liabilitas Pajak Tangguhan				
PT TIJA	(137.827)	(10.257)	4.348	(143.736)
PT STU	(2.694)	567	--	(2.127)
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	(140.521)	(9.690)	4.348	(145.863)

Berdasarkan penilaian yang dibuat oleh manajemen, Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer antara pajak dan komersial karena sebagian besar penghasilan Perusahaan telah dikenakan pajak final sehingga dampak pajak tangguhannya dipertimbangkan tidak material.

9. Pajak Final

Jumlah beban pajak final untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp5.930 dan Rp2.848 yang dihitung dari pendapatan yang dikenakan pajak final masing-masing sebesar Rp59.299 dan Rp29.959.

10. Biaya Dibayar di Muka

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Asuransi	3.586	4.580
Lain-lain	14.718	16
Jumlah	18.304	4.596

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

11. Investasi pada Ventura Bersama

31 Maret 2024						
Domisili	Persentase Kepemilikan	Saldo Awal	Pengembalian Investasi	Bagian Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan	Saldo Akhir	
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	
KSO Pembangunan Jaya Property	Jakarta	65,00	3.795	--	28	3.823
KSO Ancol Batavia	Jakarta	50,00	2.020	--	--	2.020
Jumlah			5.815	--	28	5.843

31 Desember 2023						
Domisili	Persentase Kepemilikan	Saldo Awal	Pengembalian Investasi	Bagian Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan	Saldo Akhir	
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	
KSO Pembangunan Jaya Property	Jakarta	65,00	4.569	--	(774)	3.795
KSO Ancol Batavia	Jakarta	50,00	2.009	--	11	2.020
Jumlah			6.578	--	(763)	5.815

KSO Pembangunan Jaya Property

Tanggal 21 Desember 2011 Perusahaan dan PT Jaya Real Property Tbk mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) pembangunan apartemen *double decker* dan kondominium di kawasan Ancol Barat beserta sarana dan prasarananya, dengan komposisi bagi hasil Perusahaan dan PT Jaya Real Property Tbk masing-masing sebesar 65% dan 35%.

Berdasarkan addendum II Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 15 Desember 2014 para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama pada proyek kondominium di atas tanah seluas 12.162 m², atas addendum ini proyek yang dijalankan hanya pembangunan apartemen *Double Decker* seluas 2.650 m².

Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Pembagian Keuntungan dan Pengembalian Sebagian Investasi KSO Pembangunan Jaya Property tanggal 20 April 2020, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menerima sebesar Rp5.216 atas pembagian keuntungan sebesar 65% dari nilai laba bersih sampai dengan tahun 2019, dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk berhak menerima sebesar 65% dari total pengembalian sebagian investasi senilai Rp7.800.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Perusahaan dengan PT Jaya Real Property Tbk No. PJA : 001/DIR-PJA/VII/2020 No.JRP: 004/BAK/ JRP-PJA/VII/2020 tentang pengakhiran Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Dalam Rangka Pembangunan Hunian dan Komersial di Kawasan Ancol Barat Beserta Dengan Sarana dan Prasarananya memutuskan bahwa Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengakiri Perjanjian Kerjasama yang akan dituangkan dalam Akta Notaris pengakhiran perjanjian yang ditunjuk dan/atau disepakati oleh kedua belah pihak. Sampai dengan tanggal laporan keuangan terbit, belum terdapat pengakhiran perjanjian tersebut.

KSO Ancol Batavia

Pada tanggal 20 April 2022 PT JA dan PT Batavia Pictures mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) pembuatan dan pengembangan *Intellectual Property* (IP) dengan porsi kontribusi berupa penyertaan modal ke dalam KSO dengan komposisi PT JA dan PT Batavia Pictures masing-masing sebesar 50%.

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

12. Investasi pada Entitas Asosiasi

Perusahaan memiliki penyertaan saham pada entitas asosiasi yang dipertanggungjawabkan dengan metode ekuitas sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
PT Fauna Land Ancol (PT FLA)	15.204	15.420
PT Philindo Sporting Amusement and Tourism Corporation (PT PSATC)	6.269	5.955
PT Jakarta Akses Tol Priok (PT JATP)	4.887	4.948
PT Jaya Kuliner Lestari (PT JKL)	2.152	2.195
PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta (PT KEKMJ)	1.079	1.078
Jumlah	29.591	29.596

Rincian dan mutasi investasi pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024						
	Domisili	Persentase Kepemilikan	Nilai Tercatat	Penambahan (Pelepasan)	Penerimaan Dividen	Bagian Laba (Rugi) Neto	Saldo Akhir
		%	Awal Tahun Rp	Investasi Rp	Rp	Tahun Berjalan Rp	Rp
PT Fauna Land Ancol (FLA)	Jakarta	35,00	15.420	--	--	(216)	15.204
PT Philindo Sporting Amusement and Tourism Corporation (PSATC)	Jakarta	50,00	5.955	--	--	314	6.269
PT Jakarta Akses Tol Priok (JATP)	Jakarta	50,00	4.948	--	--	(61)	4.887
PT Jaya Kuliner Lestari (JKL)	Jakarta	25,00	2.195	--	--	(43)	2.152
PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta (KEKMJ)	Jakarta	25,00	1.078	--	--	1	1.079
Jumlah			29.596	--	--	(5)	29.591

	31 Desember 2023						
	Domisili	Persentase Kepemilikan	Nilai Tercatat	Penambahan (Pelepasan)	Penerimaan Dividen	Bagian Laba (Rugi) Neto	Saldo Akhir
		%	Awal Tahun Rp	Investasi Rp	Rp	Tahun Berjalan Rp	Rp
PT Fauna Land Ancol (FLA)	Jakarta	35,00	16.212	--	--	(792)	15.420
PT Philindo Sporting Amusement and Tourism Corporation (PSATC)	Jakarta	50,00	--	--	--	5.955	5.955
PT Jakarta Akses Tol Priok (JATP)	Jakarta	50,00	6.429	--	(19.781)	18.300	4.948
PT Jaya Kuliner Lestari (JKL)	Jakarta	25,00	2.660	--	(1.000)	535	2.195
PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta (KEKMJ)	Jakarta	25,00	1.060	--	--	18	1.078
Jumlah			26.361	--	(20.781)	24.016	29.596

PT PSATC

Perusahaan telah melakukan absorb rugi penuh atas investasi ini pada tahun 2022. Bagian kerugian yang tidak diakui sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp152. Pada 31 Desember 2023 Perusahaan mendapatkan porsi laba sebesar Rp6.107 dan melakukan absorb laba bersih sebesar Rp5.955.

PT JATP

Berdasarkan Akta No. 32 tanggal 17 Februari 2023 dari Notaris Pratiwi Handayani S.H., dan Surat keputusan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pembagian Dividen Interim tahun 2023 No. 02/JAPT/Kpts/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, Komisaris, Direksi, dan pemegang saham PT JATP menyetujui pembagian dividen sebesar Rp19.781 kepada PT JAPT.

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JKL

Pada tahun 2023, PT JKL melakukan pembagian dividen sebesar Rp1.000 kepada PT TI.

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada entitas asosiasi.

Berikut adalah informasi keuangan entitas asosiasi per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023:

	<u>31 Maret 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Jumlah Agregat Aset	89.934	125.544
Jumlah Agregat Liabilitas	11.331	46.557
Jumlah Agregat Pendapatan	19.603	48.126
Jumlah Agregat Laba Komprehensif	(697)	48.766

13. Investasi Jangka Panjang Lainnya

		<u>31 Maret 2024</u>			
	<u>Tempat Kedudukan</u>	<u>%</u>	<u>Saldo Awal</u>	<u>Perubahan Nilai Wajar</u>	<u>Saldo Akhir</u>
PT Jakarta Tollroad Development (JTD)	Jakarta	5,89%	128.298	--	128.298
PT Jaya Bowling Indonesia (JBI)	Jakarta	16,75%	638	--	638
Jumlah			<u>128.936</u>	<u>--</u>	<u>128.936</u>
		<u>31 Desember 2023</u>			
	<u>Tempat Kedudukan</u>	<u>%</u>	<u>Saldo Awal</u>	<u>Perubahan Nilai Wajar</u>	<u>Saldo Akhir</u>
PT Jakarta Tollroad Development (JTD)	Jakarta	5,89%	183.487	(55.189)	128.298
PT Jaya Bowling Indonesia (JBI)	Jakarta	16,75%	638	--	638
Jumlah			<u>184.125</u>	<u>(55.189)</u>	<u>128.936</u>

PT JTD

Pada tanggal 2 Juni 2022, Perusahaan melakukan reklasifikasi investasi pada JTD yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai investasi pada entitas asosiasi menjadi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Pengakuan awal investasi diukur pada nilai wajar sebesar Rp265.669 berdasarkan perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik Asrori dan Rekan, penilai independen, dalam laporannya No. 00047/2.0126-00/BS/05/0338/1/III/2023 tanggal 24 Maret 2023. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui di laba rugi.

Berdasarkan Akta No. 71 tanggal 28 Desember 2022 dari Notaris Aulia Taufani S.H., mengenai pernyataan keputusan para pemegang saham terkait dengan peningkatan modal dasar melalui penerbitan 294.026 lembar saham seri B dengan nilai Rp1.000.000. Perusahaan tidak mengambil bagian atas penerbitan saham sehingga kepemilikan investasi Perusahaan di PT JTD menjadi sebesar 6,66%.

Nilai wajar investasi saham PT JTD pada tanggal 30 November 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp133.575 dan Rp183.487 didasarkan pada perhitungan penilai publik oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid dan Rekan serta Asrori dan Rekan, penilai independen, dalam laporannya tanggal 26 Januari 2024 dan 24 Maret 2023. Perubahan nilai wajar masing-masing sebesar Rp55.189 dan Rp82.182 diakui pada penghasilan komprehensif lain.

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan Akta No. 50 tanggal 18 Desember 2023 dari Notaris Aulia Taufani S.H., mengenai pernyataan keputusan para pemegang saham terkait dengan peningkatan modal ditempatkan/disetor menjadi 751.035 lembar saham dengan nilai Rp1.000.000 (Rupiah Penuh). Perusahaan tidak mengambil bagian atas penerbitan saham sehingga kepemilikan investasi Perusahaan di PT JTD menjadi sebesar 5,89%.

Berdasarkan perubahan kepemilikan Perusahaan di PT JTD tersebut, maka manajemen melakukan penyesuaian atas nilai wajar sebesar Rp5.277 yang diakui pada penghasilan komprehensif lain. Nilai wajar investasi saham atas kepemilikan 5,89% Perusahaan di JTD pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp128.298.

Pengukuran nilai wajar menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode arus kas terdiskonto dan pendekatan biaya dengan metode biaya pengganti/reproduksi tersusutkan (Tingkat 3).

14. Aset Real Estat

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Tanah	202.653	204.568
Rumah dan Apartemen	73.582	75.475
Jumlah	276.235	280.043

a. Mutasi tanah :

Tahun	Saldo Awal	Penambahan	Penjualan	Saldo Akhir
31 Maret 2024	204.568	--	(1.915)	202.653
31 Desember 2023	204.021	547	--	204.568

Lokasi, luas dan nilai perolehan atas tanah adalah sebagai berikut:

Lokasi	31 Maret 2024		31 Desember 2023	
	Luas Tanah m²	Nilai Perolehan Rp	Luas Tanah m²	Nilai Perolehan Rp
Ancol Timur	282.468	162.582	282.628	164.497
Ancol Barat	5.436	20.548	5.436	20.548
Marunda	26.957	18.447	26.957	18.447
Tugu Permai	3.855	929	3.855	929
Sunter	1.585	147	1.585	147
Jumlah	320.301	202.653	320.461	204.568

Tanah Perusahaan di Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara dengan HGB No. 649 luas sebesar 1.585 m² dan nilai perolehan sebesar Rp147 masing-masing pada 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, tercatat atas nama PT Regional Engineering dan Aluminium Manufacturing & Co.

b. Mutasi rumah dan apartemen :

Tahun	Saldo Awal	Penambahan	Penjualan	Saldo Akhir
31 Maret 2024	75.475	--	(1.893)	73.582
31 Desember 2023	75.351	124	--	75.475

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Lokasi, jumlah dan nilai perolehan atas rumah dan apartemen adalah sebagai berikut:

Lokasi	31 Maret 2024		31 Desember 2023	
	Jumlah Unit	Nilai Perolehan Rp	Jumlah Unit	Nilai Perolehan Rp
Ancol Timur	20	59.888	22	61.781
Pademangan	21	12.335	21	12.335
Ancol Barat	6	1.359	6	1.359
Jumlah	47	73.582	49	75.475

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 Perusahaan telah mengasuransikan aset real estat kepada pihak ketiga yang tergabung dalam suatu polis asuransi gabungan bersama aset tetap (Catatan 16).

15. Properti Investasi

	2024				
	1 Januari	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Maret
Biaya Perolehan:					
Tanah	4.523	--	--	--	4.523
Bangunan	280.028	--	--	--	280.028
Sarana dan Prasarana	25.318	--	--	--	25.318
Jumlah	309.869	--	--	--	309.869
Akumulasi Penyusutan:					
Bangunan	84.052	1.657	--	--	85.709
Sarana dan Prasarana	19.543	184	--	--	19.727
Jumlah	103.595	1.841	--	--	105.436
Nilai Tercatat	206.274				204.433
	2023				
	1 Januari	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember
Biaya Perolehan:					
Tanah	4.523	--	--	--	4.523
Bangunan	280.028	--	--	--	280.028
Sarana dan Prasarana	25.318	--	--	--	25.318
Jumlah	309.869	--	--	--	309.869
Akumulasi Penyusutan:					
Bangunan	77.424	6.628	--	--	84.052
Sarana dan Prasarana	18.807	736	--	--	19.543
Jumlah	96.231	7.364	--	--	103.595
Nilai Tercatat	213.638				206.274

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, Perusahaan telah mengasuransikan properti investasi kepada pihak ketiga yang tergabung dalam suatu polis asuransi gabungan bersama aset tetap (Catatan 16).

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 tidak terdapat properti investasi milik Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman kepada pihak ketiga.

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pendapatan sewa yang diterima Perusahaan dari properti investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp526 dan Rp135 (Catatan 30).

Beban penyusutan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 dicatat sebagai bagian dari beban langsung masing-masing sebesar Rp1.841 (Catatan 31).

Beban operasi yang dikeluarkan untuk melakukan pemeliharaan properti investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 sebesar Rp47 dan Rp44 (Catatan 31).

16. Aset Tetap

	2024				31 Maret
	1 Januari	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Biaya Perolehan:					
Tanah	15.297	--	--	--	15.297
Bangunan	1.166.997	--	--	17.499	1.184.496
Sarana dan Prasarana	1.173.341	--	--	4.026	1.177.367
Mesin dan Perlengkapan	1.191.779	--	--	12.428	1.204.207
Peralatan	67.839	--	--	385	68.224
Kendaraan	4.846	--	--	211	5.057
Kapal	5.110	--	--	--	5.110
Binatang	12.438	--	--	950	13.388
Sub Jumlah	3.637.647	--	--	35.499	3.673.146
Aset Dalam Penyelesaian	768.907	39.300	--	(35.499)	772.708
Jumlah Biaya Perolehan	4.406.554	39.300	--	--	4.445.854
Akumulasi Penyusutan:					
Bangunan	455.981	7.596	--	--	463.577
Sarana dan Prasarana	628.198	6.209	--	--	634.407
Mesin dan Perlengkapan	662.956	10.979	--	--	673.935
Peralatan	63.969	427	--	--	64.396
Kendaraan	4.580	48	--	--	4.628
Kapal	4.743	30	--	--	4.773
Binatang	7.329	263	--	--	7.592
Jumlah	1.827.756	25.552	--	--	1.853.308
Beban Penurunan:					
Nilai Aset Tetap	322	--	--	--	322
Nilai Aset dalam Penyelesaian	122.674	--	--	--	122.674
Nilai Tercatat	2.455.802				2.469.550

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2023				
	1 Januari	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember
Biaya Perolehan					
Tanah	15.297	--	--	--	15.297
Bangunan	1.141.600	--	(1.619)	27.016	1.166.997
Sarana dan Prasarana	1.156.676	--	(1.810)	18.475	1.173.341
Mesin dan Perlengkapan	1.151.645	--	(67)	40.201	1.191.779
Peralatan	66.922	--	(9)	926	67.839
Kendaraan	4.654	--	--	192	4.846
Kapal	5.110	--	--	--	5.110
Binatang	12.239	--	--	199	12.438
Sub Jumlah	3.554.143	--	(3.505)	87.009	3.637.647
Aset Dalam Penyelesaian	747.438	108.478	--	(87.009)	768.907
Jumlah	4.301.581	108.478	(3.505)	--	4.406.554
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	427.705	29.895	(1.619)	--	455.981
Sarana dan Prasarana	605.068	24.940	(1.810)	--	628.198
Mesin dan Perlengkapan	623.175	39.848	(67)	--	662.956
Peralatan	62.181	1.797	(9)	--	63.969
Kendaraan	4.433	147	--	--	4.580
Kapal	4.614	129	--	--	4.743
Binatang	6.356	973	--	--	7.329
Jumlah	1.733.532	97.729	(3.505)	--	1.827.756
Beban Penurunan Nilai					
Aset Tetap	322	--	--	--	322
Aset dalam Penyelesaian	58.289	64.385	--	--	122.674
Nilai Tercatat	2.509.439				2.455.802

Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut:

	31 Maret	
	2024	2023
Beban Langsung (Catatan 31)	24.220	21.183
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 33)	1.332	1.409
Jumlah	25.552	22.592

Perusahaan memiliki tanah yang terletak di Jakarta Utara, dengan hak legal berupa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemda DKI, seluas 4.779.120 m2, juga memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Jakarta Utara dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang berakhir di tahun 2027. Untuk HPL, selama tanah tersebut dipergunakan untuk industri, perumahan dan rekreasi, Perusahaan akan tetap mempunyai hak untuk mengelolanya.

Penambahan aset tetap untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 berasal dari Inovasi Cottage Putri Duyung Ancol, Renovasi Dunia Fantasi, Ocean Dream Samudera, dan Area Taman Impian. Penambahan aset tetap pada tahun 2023 berasal dari Penggantian Sistem ERP SAP dan HCMS, Renovasi Dunia Fantasi, Ocean Dream Samudera, Atlantis Water Adventure, Seaword Ancol dan Area Taman Impian.

Aset dalam penyelesaian per 31 Maret 2024 sebesar Rp772.708 dengan kenaikan bersih sebesar Rp3.801 pada tahun berjalan sebagian besar atas Renovasi Dunia Fantasi, Ocean Dream Samudera dan Area Taman Impian.

Aset dalam penyelesaian untuk proyek perluasan kawasan pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp526.933 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp521.923. Pada tanggal 24 Februari 2020, Gubernur DKI Jakarta secara resmi mengumumkan izin perluasan pengembangan kawasan seluas 155 hektare. Izin

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas ± 35 Hektare Dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas ± 120 Hektar (Catatan 40.c).

Penambahan aset tetap yang berasal dari penambahan utang lain-lain pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.436 dan Rp6.278 (Catatan 44).

Nilai wajar aset dalam penyelesaian untuk proyek perluasan kawasan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.187.469 didasarkan pada perhitungan penilai publik oleh Kantor Jasa Penilai Publik Asrori dan Rekan, penilai independen, dalam laporannya No. 00046/2.0126-00/PI/05/0338/1/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 seluruh properti investasi dan aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan kepada PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT Sampo Insurance Indonesia, PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Sunday Insurance Indonesia, PT Mandiri Axa General Insurance, PT Asuransi Astra Buana, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Asuransi Multi Artha Guna, PT Tokio Marine Indonesia dan PT Asuransi Umum BCA, pihak ketiga, terhadap risiko gempa bumi, kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.035.723.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

17. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

	2024			
	1 Januari	Penambahan	Pengurangan	31 Maret
Biaya Perolehan				
Tanah	106.118	--	(9.378)	96.740
Bangunan	3.027	--	--	3.027
Jumlah	<u>109.145</u>	<u>--</u>	<u>(9.378)</u>	<u>99.767</u>
Akumulasi Penyusutan				
Tanah	27.912	2.438	(717)	29.633
Bangunan	2.270	151	--	2.421
Jumlah	<u>30.182</u>	<u>2.589</u>	<u>(717)</u>	<u>32.054</u>
Nilai Tercatat	<u>78.963</u>			<u>67.713</u>
	2023			
	1 Januari	Penambahan	Modifikasi Sewa	31 Desember
Biaya Perolehan				
Tanah	106.118	--	--	106.118
Bangunan	--	3.027	--	3.027
Jumlah	<u>106.118</u>	<u>3.027</u>	<u>--</u>	<u>109.145</u>
Akumulasi Penyusutan				
Tanah	20.802	7.110	--	27.912
Bangunan	--	2.270	--	2.270
Jumlah	<u>20.802</u>	<u>9.380</u>	<u>--</u>	<u>30.182</u>
Nilai Tercatat	<u>85.316</u>			<u>78.963</u>

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 22 Agustus 2023, berdasarkan Akta No. 45 tentang Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perusahaan tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang berlokasi di Kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jalan Lodan Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota dengan nilai sebesar Rp3.500 dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 5 April 2020 dan berakhir pada tanggal 4 April 2025.

Beban penyusutan seluruhnya dialokasikan pada Beban Langsung (Catatan 31) pada 31 Maret 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.872 dan Rp1.778.

Berikut ini ringkasan komponen liabilitas sewa berdasarkan jangka waktu:

	<u>31 Maret 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Liabilitas Sewa		
Jatuh tempo dalam satu tahun	11.427	10.451
Jatuh tempo dalam lebih dari satu tahun	117.559	141.974
Jumlah	128.986	152.425
Dikurangi bagian bunga	(39.343)	(52.220)
Nilai kini Pembayaran Sewa	89.643	100.205
Dikurangi: bagian jatuh tempo satu tahun	(4.958)	(3.126)
Bagian Jangka Panjang	84.685	97.079

Berikut ini ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa:

	<u>31 Maret 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Saldo Awal	100.205	101.654
Arus Kas	(2.856)	(12.376)
Penambahan	--	3.027
Perubahan Nonkas		
Penambahan Bunga	1.672	7.900
Modifikasi Sewa	(9.378)	--
Saldo Akhir	89.643	100.205

18. Aset Lain-lain

a. Aset Lain-lain Lancar

	<u>31 Maret 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Deposito Berjangka		
PT Bank Permata Tbk	2.500	2.500
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	73	73
Jumlah	2.573	2.573

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

b. Aset Lain-lain Tidak Lancar

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Dana Dibatasi penggunaannya		
Pihak Berelasi (Catatan 38)	7.332	7.332
Pihak Ketiga		
PT Bank Negara Indonesia		
(Persero) Tbk	349	349
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	243	243
Sub Jumlah	7.924	7.924
Aset Takberwujud		
Perangkat Lunak Komputer		
dan Lisensi	68.982	66.762
Hak atas Tanah	13.067	13.067
Jumlah	82.049	79.829
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi	(61.329)	(58.319)
Sub Jumlah	20.720	21.510
Lain-lain	2.588	5.161
Jumlah	31.232	34.595

Deposito berjangka pada PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memiliki tingkat suku bunga per tahun masing-masing sebesar 3,25%. Tipe dari dari deposito ini adalah *Automatic Roll Over* (ARO) dengan jangka waktu 1 tahun.

Perangkat lunak komputer dan lisensi merupakan biaya atas pembelian piranti lunak yang bersifat spesifik berdasarkan proses bisnis Grup serta lisensi atas musik dan wahana.

Pada tahun 1994, PT SI memperoleh Hak Pengelolaan atas pulau Bidadari di Kepulauan Seribu seluas 38.220 m² dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (Pemda DKI) Jakarta, sebagaimana tersebut dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 3280/1.711.5 tanggal 12 Oktober 1994, dengan jangka waktu 20 tahun. Pada tahun 2003, telah terjadi peningkatan status SIPPT tersebut menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai sebagaimana tersebut dalam HGB No. 255 tanggal 31 Juli 2003 dan Hak Pakai No. 19 tanggal 25 September 2003. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengurusan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi selama umur Hak Guna Bangunan/HGB, Sampai dengan laporan ini diterbitkan Grup masih dalam proses pengurusan perpanjangan Hak Guna Bangunan ini.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, Grup mencatat beban amortisasi masing-masing sebesar Rp3.010 dan Rp3.651 yang dialokasikan ke beban pokok pendapatan dan beban langsung serta beban umum dan administrasi.

19. Utang Usaha

Jumlah utang usaha berdasarkan umur (hari) adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Pihak Berelasi (Catatan 38)	840	840
Pihak Ketiga		
PT Bumi Daya Plaza	1.158	3.599
PT Media Prima Solutions	1.059	1.059
PT Estetika Surya Pesona	800	--
PT Iss Indonesia	787	--
Lain-lain (Masing-masing dibawah Rp500 Juta)	14.569	6.669
Sub Jumlah	18.373	11.327
Jumlah	19.213	12.167

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jumlah utang usaha berdasarkan umur (hari) adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Belum Jatuh Tempo	11.331	5.371
Sudah Jatuh Tempo		
1-30 hari	54	74
31-60 hari	492	671
61-90 hari	1.306	1.106
>90 hari	6.031	4.945
Jumlah	<u>19.213</u>	<u>12.167</u>

20. Utang Lain-lain

	<u>31 Maret 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Pihak Ketiga		
CV Istana Timur Teknik	2.323	1.731
PT Emtu Karya Sentosa	1.674	1.328
PT Envitek Indonesia Jaya	1.590	--
PT Deka Buana Swastamas	1.181	941
PT Putra Anugerah Mandiri	1.019	462
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	12.071	10.960
Sub Jumlah	<u>19.858</u>	<u>15.422</u>
Jumlah	<u>19.858</u>	<u>15.422</u>

21. Beban Akrual dan Provisi

	<u>31 Maret 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Bonus dan Tantiem	46.088	43.318
Alih Daya	26.276	20.290
Pajak Bumi dan Bangunan	16.531	--
Operasional	12.167	44.211
Logistik	5.401	5.876
Gaji	4.297	10.775
Lisensi Wahana	2.312	2.312
Pemeliharaan	2.168	2.168
Iklan	1.402	1.402
Bunga	1.046	3.265
Lain-lain	9.178	611
Jumlah Beban Akrual	<u>126.865</u>	<u>134.228</u>
Provisi	84.135	84.135
Jumlah	<u>211.000</u>	<u>218.363</u>

Beban akrual operasional adalah utang kepada pihak ketiga dan pihak berelasi sehubungan dengan kegiatan operasional Perusahaan dan PT TIJA meliputi kegiatan penjualan, pemasaran, iklan, perbaikan, penyewaan, pemeliharaan dan beban utilitas.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan membentuk provisi sehubungan dengan kewajiban Perusahaan atas pemenuhan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

22. Utang Bank

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Pihak Berelasi (Catatan 38)	705.319	666.000
Biaya Provisi	(7.181)	(7.885)
Jumlah	698.138	658.115
Dikurangi:Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(230.599)	(40.919)
Bagian Jangka Panjang	467.539	617.196

PT Bank DKI

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.1489/SPPK/925/IX/2023 tanggal 19 September 2023, tentang perpanjangan jangka waktu fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Berjangka (KMK PTB) dan perubahan syarat dan ketentuan fasilitas Kredit Investasi *refinancing*, Perusahaan memperoleh perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan limit Rp389.000 dengan jangka waktu 24 bulan sejak jatuh tempo fasilitas kredit atau sampai dengan 20 September 2025. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar 6,75% per tahun.

Perjanjian kredit ini dijamin dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanah seluas 23.285 m2 yang terletak di Jl. R. E Martadinata kel. Ancol beserta bangunan Dunia Fantasi di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan;
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Bangunan Dunia Fantasi.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.2161/SPPK/910/IX/2021 tanggal 16 September 2021, terdapat perubahan tingkat bunga semula 7,15% per tahun menjadi 7% per tahun.

Berdasarkan Akta No. 56 tanggal 20 Desember 2021, tentang Perjanjian Kredit Investasi *Refinancing*, yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dengan nilai Rp516.000 dengan jangka waktu 24 bulan untuk *grace period* dan 84 bulan untuk masa setelah *grace period* sejak jatuh tempo fasilitas kredit atau total jangka waktu sampai dengan 14 Desember 2030. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar Jibor 3 bulan + margin 1,75% (selama *grace period*) dan Jibor 3 bulan + margin 3% (setelah *grace period*).

Perjanjian kredit ini dijamin dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang terdaftar sebagai SHGB No 2943, seluas 23.285 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13-3-2007 No.01911/Ancol/2007 dengan No. Identifikasi Bidang (NIB) 0905070101905;
2. Izin mendirikan bangunan atas bangunan Dunia Fantasi Pengikatan Hak Tanggungan I sebesar Rp850.000.

Adapun *affirmative covenants* yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan fasilitas kredit sesuai tujuan penggunaan kredit.
2. Menyampaikan laporan keuangan audited yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (Sesuai Akta Perseroan KAP ditunjuk oleh Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk) paling lambat 180 hari kalender setelah akhir periode laporan.
3. Menyampaikan laporan keuangan *in-house* setiap triwulan paling lambat 60 hari kalender setelah akhir laporan.
4. Menyampaikan laporan realisasi jumlah pengunjung bulanan, dan relisasi pendapatan bulanan paling lambat 30 hari kalender setelah bulan berjalan.
5. Memelihara *Debt to Equity Ratio* maksimal sebesar 2,5 kali.
6. Dalam rangka sinergi BUMD, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk bersedia menjadikan Bank DKI sebagai Bank Utama Debitur termasuk dan tidak terbatas pada:
 - a. Bank penerima pembayaran yang berasal dari penerimaan tiket termasuk penjualan melalui *website* dan *e-commerce*.

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- b. Bank penerima pembayaran yang terkait dengan kegiatan usaha debitur yang tidak melalui Bank DKI wajib dipindahbukukan maksimal H+2 ke Rekening debitur di Bank DKI.
 - c. Menyerahkan rekening koran bulanan debitur pada bank lain paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
 - d. Memberikan akses *inquiry* untuk *system payment gateway* pada *website* ancol.
 - e. Penempatan Dana Utama (Bank DKI minimal 90% dari total kas dan bank debitur)
 - f. Penggunaan CMS.
 - g. Pembayaran *payroll* karyawan.
 - h. KMG Karyawan.
 - i. Memprioritaskan Bank DKI sebagai mitra apabila menyelenggarakan program-program khusus kepada *customer*.
 - j. Debitur bersedia melunasi pembayaran kewajiban kepada *vendor/supplier* sesuai dengan perjanjian yang berlaku.
7. Memiliki ijin-ijin yang dipersyaratkan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinyadan berkewajiban untuk memperpanjang atau memperbaharui ijin-ijin dalam hal telah habis masa belakunya serta menyerahkan copy perpanjangan ke Bank DKI.
 8. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank DKI, selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal kejadian jika terdapat perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, direksi, komisaris, permodalan dan nilai nominal saham.
 9. Senantiasa selalu menjaga kualitas kredit atas nama Perusahaan dan Pengurus Perusahaan.

Pembatasan Terhadap Tindakan Nasabah (*Negative Covenants*):

Selama kredit belum lunas, Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank DKI, selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal kejadian jika:

1. Membayar/melunasi utang pemegang saham.
2. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang sudah atau belum dijaminkan ke Bank DKI kepada pihak lain.
3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain dan/atau lembaga lain.

Saldo utang bank pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp698.138 dan Rp658.115.

23. Utang Obligasi

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol		
Tahap II Tahun 2021	65.400	215.000
Biaya Emisi Obligasi	(274)	(371)
Akumulasi Amortisasi	137	152
Jumlah	<u>65.263</u>	<u>214.781</u>
Dikurangi: Bagian Jatuh		
Tempo Dalam Satu Tahun	--	(149.568)
Bagian Jangka Panjang	<u>65.263</u>	<u>65.213</u>

Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021

Pada tanggal 10 Februari 2021, Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 yaitu:

- a. Seri A senilai Rp516.000 dengan suku bunga 7,25% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 20 Februari 2022.
- b. Seri B senilai Rp149.600 dengan suku bunga 8,90% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 10 Februari 2024.
- c. Seri C senilai Rp65.400 dengan suku bunga 9,60% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 10 Februari 2026.

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 10 Februari 2021, dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 adalah sebesar Rp731.000. Sesuai perjanjian dengan PT Bank Permata Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi Perusahaan.

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan. Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 mendapatkan peringkat idA (*Single A*) untuk penerbitan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Peringkat tersebut memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan dan kemampuan Obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan obligor lainnya di Indonesia adalah sangat kuat.

- Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 2:1.
- Perbandingan Profit sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 2:1.

Pada tanggal 8 Februari 2022, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 Seri A senilai Rp516.000 dan pada tanggal 10 Februari 2024, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 Seri B senilai Rp149.600.

24. Pendapatan Diterima di Muka dan Uang Muka Pelanggan

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Pendapatan Diterima di Muka		
Sewa	205.340	210.285
Proyek Ancol Beach City	132.684	135.051
Uang Muka <i>E-Commerce</i>	39.914	10.408
Uang Titipan	29.880	29.922
Uang Muka Rombongan	8.345	8.345
Sponsor	3.525	4.320
Lain-lain	2.221	5.462
Sub Jumlah	<u>421.909</u>	<u>403.793</u>
Uang Muka Pelanggan Penjualan Tanah dan Bangunan	359	2.540
Jumlah	<u>422.268</u>	<u>406.333</u>
Dikurangi : Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(114.793)	(116.695)
Bagian Jangka Panjang	<u>307.475</u>	<u>289.638</u>

Pendapatan sewa diterima di muka terutama merupakan penyewaan lahan Perusahaan untuk pengembangan jaringan di pipa gas bumi milik PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PT PGN) (Catatan 40.d) dan jaringan di pipa gas bumi milik PT Pertamina Gas (PT Pertagas) (Catatan 41.d).

Pendapatan diterima di muka atas proyek Ancol Beach City berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengoperasian Bangunan *Music Stadium* No. 021/DIRPJA/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan 31 Juli 2013, Perusahaan sepakat dan setuju untuk menyerahkan bangunan tersebut untuk dioperasikan oleh PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) selama 25 (dua puluh lima) tahun.

25. Jaminan Pelanggan dan Deposit Lainnya

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Jaminan Tiket	10.833	1.676
Jaminan Penyewa	4.856	11.721
Jumlah	<u>15.689</u>	<u>13.397</u>

Uang Jaminan yang diterima merupakan uang yang dibayarkan *tenant* kepada PT TIJA sebagai jaminan usaha di kawasan Ancol.

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jaminan tiket sebagian besar merupakan uang deposit tiket melalui kerjasama dengan *platform e-commerce*.

26. Liabilitas Imbalan Kerja

Grup membukukan manfaat karyawan sesuai dengan peraturan Grup dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan manfaat karyawan tersebut adalah masing-masing sebanyak 568 pada 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023. Liabilitas imbalan kerja karyawan terdiri dari liabilitas imbalan pascakerja sesuai undang-undang tenaga kerja dan liabilitas imbalan kerja lainnya berupa manfaat cuti besar dan penghargaan masa kerja.

Program Imbalan Pasti

Pada 31 Desember 2022, Perusahaan dan PT TIJA telah menempatkan dana sebesar Rp13.291 pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) AXA Mandiri untuk kompensasi pesangon pegawai.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan kerja jangka panjang lainnya terdiri dari:

- Imbalan Penghargaan Masa Kerja dalam bentuk cincin pengabdian terbuat dari 10 (sepuluh) gram emas. Penghargaan diberikan kepada karyawan yang telah menjalani masa kerja 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus tanpa terputus sejak diangkat menjadi karyawan tetap;
- Imbalan Cuti Panjang berupa tunjangan cuti panjang sebesar 1 (satu) kali gaji bulanan diberikan kepada karyawan yang telah menjalani setiap kelipatan 5 (lima) tahun masa kerja.

Total liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	150.190	157.308
Nilai Wajar Aset Program	--	(8.479)
Liabilitas Imbalan Kerja	<u>150.190</u>	<u>148.829</u>

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Liabilitas Imbalan Pasti Neto Awal Periode	148.829	98.114
Biaya yang diakui pada Laporan Laba/Rugi (Catatan 32)	5.201	20.820
Kontribusi Pemberi Kerja Periode Berjalan	(3.840)	(5.040)
Pembayaran Imbalan oleh Perusahaan	--	(2.060)
Pendapatan yang diakui pada Penghasilan Komprehensif Lain	--	36.995
Liabilitas Imbalan Pasti Neto Akhir Periode	<u>150.190</u>	<u>148.829</u>

Mutasi Kerugian Komprehensif Lain adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Penghasilan Komprehensif Lain Awal Periode	92.699	38.988
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan	--	36.995
Akumulasi Pajak Penghasilan Terkait	--	16.716
Beban Komprehensif Lain Akhir Periode Setelah Pajak	<u>92.699</u>	<u>92.699</u>

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Saldo liabilitas imbalan kerja dan imbalan lainnya pada 31 Desember 2022 didasarkan pada perhitungan aktuaria oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, aktuaris independen, dalam laporannya tertanggal 8 Maret 2023 menggunakan asumsi sebagai berikut:

31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023

Tingkat Kematian	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia VI Tahun 2019
Umur Pensiun Normal	55 tahun
Tingkat Cacat	10% per tahun
Kenaikan Gaji	6,7% per tahun
Tingkat Diskonto	7,25%-7,30% per tahun
Tingkat Pengunduran Diri	1% pada usia 20 tahun dan menurun secara <i>linier</i> sampai dengan usia 55 tahun

Program liabilitas imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, dan risiko gaji.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti pensiun kesehatan dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program.

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal pasti hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir tahun pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan.

27. Modal Saham

Nama Pemegang Saham	31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan	Jumlah Modal Disetor
Pemerintah DKI Jakarta			
Saham Seri A	1	0,0000001%	0,00050
Saham Seri C	1.151.999.998	71,9999999%	288.000
Jumlah	1.151.999.999	72,0000000%	288.000
PT Pembangunan Jaya			
Saham Seri B	1	0,0000001%	0,00050
Saham Seri C	288.099.998	18,0099999%	72.025
Jumlah	288.099.999	18,0100000%	72.025
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%, Saham Seri C)	159.900.000	9,9900000%	39.975
Jumlah	1.599.999.998	100,0000000%	400.000

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan mengeluarkan saham Seri A, Seri B, dan Seri C dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saham Seri A

Merupakan saham yang memberikan hak istimewa kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk mencalonkan sebanyak-banyaknya 2 orang direktur dan 4 orang komisaris (termasuk 1 orang komisaris utama). Pencalonan tersebut mengikat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Saham Seri B

Merupakan saham yang memberikan hak istimewa kepada PT Pembangunan Jaya untuk mencalonkan direktur utama dan sebanyak-banyaknya 2 orang direktur serta 1 orang komisaris. Pencalonan tersebut mengikat RUPS.

3. Saham Seri C

Saham Seri C memiliki hak yang sama dengan hak yang dimiliki saham Seri A dan Seri B, kecuali hak-hak istimewa yang dimiliki saham Seri A dan Seri B sebagaimana dijelaskan.

28. Tambahan Modal Disetor dan Komponen Ekuitas Lainnya

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Pengeluaran 80.000.000 Saham melalui Penawaran Umum Tahun 2004:		
Agio Saham	42.000	42.000
Biaya Emisi Saham	(5.291)	(5.291)
Tambahan Modal Disetor dari Selisih antara Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak	3.695	3.695
Jumlah	40.404	40.404

Pada tahun 2017 perusahaan telah melaporkan aset Pengampunan Pajak atas Perseroan sebesar Rp3.695 sesuai Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET-643/PP/WPJ.07/2017 yang dicatat sebagai tambahan modal disetor.

29. Kepentingan Nonpengendali

Akun ini merupakan kepentingan nonpengendali atas aset bersih dan laba bersih Entitas Anak sebagai berikut:

Kepemilikan	31 Maret 2024				
	Nilai Tercatat Awal Tahun	Bagian Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	Tambahan Setoran Modal pada Entitas Anak	Dampak Dilusi Saham	Nilai Tercatat Akhir Periode
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Jaya Ancol Pratama Tol	40,00%	11.541	24	--	11.565
PT Sarana Tirta Utama	35,00%	9.078	(284)	--	8.794
PT Seabreez Indonesia	1,87%	461	(20)	--	441
Jumlah		21.080	(280)	--	20.800

Kepemilikan	31 Desember 2023				
	Nilai Tercatat Awal Tahun	Bagian Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	Tambahan Setoran Modal pada Entitas Anak	Dampak Dilusi Saham	Nilai Tercatat Akhir Tahun
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Jaya Ancol Pratama Tol	40,00%	4.200	7.341	--	11.541
PT Sarana Tirta Utama	35,00%	10.317	(1.239)	--	9.078
PT Seabreez Indonesia	1,87%	446	15	--	461
Jumlah		14.963	6.117	--	21.080

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

30. Pendapatan Usaha

	31 Maret	
	2024	2023
Pendapatan Real Estat		
Tanah dan Bangunan	5.676	--
Pendapatan Tiket		
Wahana Wisata	109.788	129.591
Pintu Gerbang	64.260	55.820
Sub Jumlah	174.048	185.411
Pendapatan Hotel dan Restoran		
Restoran	9.144	11.748
Kamar	6.641	7.763
Sub Jumlah	15.785	19.511
Pendapatan Usaha Lainnya		
Penyewaan Kios, Lahan, dan Gedung	31.085	28.379
Pengelolaan Perumahan	7.659	8.517
Sponsor	5.928	7.236
Barang Dagangan	5.792	3.390
Uang Sandar dan Iuran	2.150	1.580
Logistik Acara	1.713	1.337
Loker dan Permainan	1.644	1.489
Bagi Hasil	1.347	3.455
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 Miliar)	3.157	2.256
Sub Jumlah	60.475	57.639
Jumlah	255.984	262.561
Dikurangi: Potongan Penjualan	(334)	(2.214)
Bersih	255.650	260.347

31. Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung

	31 Maret	
	2024	2023
Beban Pokok Pendapatan		
Makanan dan Minuman	4.476	5.198
Tanah dan Bangunan	3.808	--
Barang Dagangan	2.903	1.307
Logistik Acara	1.230	734
Sub Jumlah	12.417	7.239
Beban Langsung		
Penyusutan dan Amortisasi (Catatan 15, 16, 17 dan 18)	29.203	24.835
Sub Kontrak Tenaga Kerja	22.930	20.159
Gaji dan Upah	22.199	17.995
Pajak Hiburan	17.698	17.270
Telepon, Listrik dan Air	13.395	13.486
Penyelenggaraan Pertunjukan	9.712	5.575
Pemeliharaan	9.020	4.568
Alat Kerja dan Operasi	2.668	1.536
Sewa	1.325	1.085
Jasa Layanan Aplikasi	1.117	2.209
Perjalanan dan Survei	818	1.193
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 Juta)	633	198
Sub Jumlah	130.718	110.109
Jumlah	143.135	117.348

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

32. Beban Penjualan dan Umum dan Administrasi

	31 Maret	
	2024	2023
Beban Penjualan		
Promosi dan Penjualan	3.144	3.374
Beban Umum dan Administrasi		
Gaji dan Upah	23.002	22.230
Pajak Bumi dan Bangunan	16.934	16.085
Imbalan Kerja (Catatan 26)	5.201	4.147
Penyusutan dan Amortisasi (Catatan 15, 16, 17 dan 18)	3.069	2.311
Jasa Profesional	2.933	1.604
Humas dan Jamuan Tamu	2.751	1.370
Asuransi	1.434	1.455
Fasilitas Karyawan	1.299	562
Telepon, Listrik dan Air	1.143	803
Pemeliharaan	704	1.075
Sub Kontrak Tenaga Kerja	605	1.116
Administrasi Bank	282	264
Transportasi dan Perjalanan Dinas	--	98
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100 Juta)	830	756
Sub Jumlah	60.187	53.876
Jumlah	63.331	57.250

33. Pendapatan Lainnya

	31 Maret	
	2024	2023
Ancol Beach City (Catatan 40.b)	2.367	2.367
Klaim Asuransi Aset	1.452	--
Pemulihan Cadangan Kerugian Piutang Usaha	--	2.395
Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp500 juta)	661	3.875
Jumlah	4.480	8.637

34. Beban Lain - Lain

	31 Maret	
	2024	2023
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha	6.498	2.407
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	1.322	709
Jumlah	7.820	3.116

35. Beban Keuangan

	31 Maret	
	2024	2023
Bunga Bank	15.547	16.846
Bunga Obligasi	3.789	4.898
Bunga Liabilitas Sewa	1.672	1.874
Amortisasi Biaya Emisi	393	185
Jumlah	21.401	23.803

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

36. Laba Per Saham

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

	31 Maret	
	2024	2023
Laba (Rugi) yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	13.020	44.980
Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham Biasa yang Beredar (Catatan 2.ab)	1.599.999.996	1.599.999.996
Laba (Rugi) per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	8	28

Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham yang bersifat dilutif sehingga tidak ada dampak dilusian pada perhitungan laba per saham.

37. Dividen dan Cadangan Umum

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 23 tanggal 23 Februari 2024 dari Notaris Aulia Taufani, S.H., pemegang saham menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2023 sebesar 21,77% dari laba bersih tahun buku 2023 atau sebesar Rp32 (dalam rupiah penuh) per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp51.200 yang telah dibayarkan di tahun 2024 dan menetapkan tambahan cadangan umum sebesar Rp2.352.

38. Sifat Transaksi dan Hubungan dengan Pihak-pihak Berelasi

Hubungan dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Jenis Transaksi
PT Bank DKI (Bank DKI)	Entitas yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham Perusahaan, yaitu Pemda DKI	Penyimpanan Uang dan Pinjaman Bank
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	Entitas yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham Perusahaan, yaitu Pemda DKI	Pemanfaatan Lahan
PT Jaya Kuliner Lestari	Entitas Asosiasi	Piutang Usaha
PT Arkonin	Entitas yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham Perusahaan, yaitu PT Pembangunan Jaya	Penagihan Jasa Konstruksi
Manajemen Kunci	Pengendali Kegiatan Perusahaan	Tantiem dan Bonus

Saldo dan transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi adalah sebagai berikut :

			Persentase Terhadap Jumlah Aset, Liabilitas, Pendapatan dan Beban	
			31 Maret 2024	31 Desember 2023
	31 Maret 2024	31 Desember 2023	31 Maret 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp	%	%
Kas dan Setara Kas (Catatan 3)				
Bank				
PT Bank DKI	30.663	10.143	0,01	0,00
Deposito Berjangka				
PT Bank DKI	224.899	355.000	0,06	0,09
Jumlah	255.562	365.143	0,07	0,10
Piutang Usaha (Catatan 4)				
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	2.544	8.577	0,00	0,00
PT Bank DKI	66	382	0,00	0,00
PT Jaya Kuliner Lestari	737	572	0,00	0,00
Sub Jumlah	3.347	9.531	0,00	0,00
Aset Lain-lain (Catatan 18)				
PT Bank DKI	7.332	9.832	0,00	0,00

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Maret 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp	Persentase Terhadap Jumlah Aset, Liabilitas, Pendapatan dan Beban	
			31 Maret 2024 %	31 Desember 2023 %
Utang Usaha (Catatan 19)				
PT Arkonin	840	840	0,00	0,00
Jumlah	840	840	0,00	0,00
Utang Bank (Catatan 22)				
PT Bank DKI	698.138	658.115	0,19	0,18
Jumlah	698.138	658.115	0,19	0,18
Pendapatan (Catatan 30)				
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	--	6.814	--	0,00
PT Bank DKI	401	719	0,00	0,00
Jumlah	401	7.533	0,00	0,00

Transaksi dengan pihak berelasi terutama merupakan pengadaan atau penyediaan jasa subkontraktor/*supplier*. Pengadaan ini diselenggarakan oleh Perusahaan dengan mengadakan tender yang pesertanya adalah pihak ketiga dan pihak berelasi yang terdaftar dalam daftar rekanan Perusahaan. Mekanisme pengadaan sesuai dengan standar pengadaan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Jumlah remunerasi jangka pendek yang diterima oleh Dewan Komisaris pada periode 31 Maret 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp1.178 dan Rp883.

Jumlah remunerasi jangka pendek yang diterima oleh Direksi pada periode 31 Maret 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp3.177 dan Rp1.990.

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan ini.

39. Segmen Operasi

Untuk tujuan pelaporan manajemen, saat ini membagi segmen operasi sesuai dengan produk dan jasa kegiatan usahanya yaitu: pariwisata, real estat serta perdagangan dan jasa. Kelompok-kelompok tersebut menjadi dasar pelaporan segmen informasi.

Kegiatan utama kelompok tersebut terdiri dari:

Pariwisata	:	Mengelola kawasan wisata, pertunjukan keliling dan penginapan wisata
Real Estat	:	Pembangunan, penjualan dan penyewaan properti
Perdagangan dan Jasa	:	Penjualan barang dagangan, jasa sarana transportasi laut dan pengelolaan restoran dan air bersih

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen operasi:

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Maret 2024				Jumlah
	Pariwisata	Real Estat	Perdagangan dan Jasa	Eliminasi	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pendapatan dari					
Pelanggan Eksternal	183.462	55.756	49.867	(33.435)	255.650
Hasil					
Hasil Segmen	(118.738)	(15.027)	(30.496)	28.379	(135.882)
Beban Langsung tidak dapat Dialokasikan					(7.253)
Laba Bruto					112.515
Penghasilan Bunga					4.221
Penghasilan Lainnya					4.480
Keuntungan Penjualan Aset Tetap					--
Beban Umum dan Administrasi					(60.187)
Beban Penjualan					(3.144)
Kerugian Selisih Kurs					(48)
Beban Lain-lain					(7.820)
Jumlah Beban Usaha					(62.498)
Rugi Sebelum Pajak dan Beban Keuangan					50.017
Beban Pajak Final					(6.071)
Beban Keuangan					(21.401)
Bagian Laba Bersih					
Investasi Ventura Bersama					28
Bagian Rugi Bersih					
Entitas Asosiasi					(5)
Rugi Sebelum Pajak					22.568
Beban Pajak Penghasilan					(9.828)
Rugi Bersih Tahun Berjalan					12.740
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak					--
Jumlah Rugi Komprehensif Tahun Berjalan					12.740
Kepentingan Non-pengendali					(280)
Aset					
Aset Segmen	2.006.917	1.271.893	159.064	(2.520.427)	917.448
Aset yang Tidak Dapat Dialokasi					2.677.643
Total Aset					3.595.091
Liabilitas					
Liabilitas Segmen	465.422	541.239	34.093	(489.049)	551.705
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasi					1.413.469
Total Liabilitas					1.965.174
Pengeluaran Modal					39.300
Penyusutan dan Amortisasi					31.939
Beban Nonkas selain Penyusutan dan Amortisasi Tidak Dapat Dialokasikan					5.201

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Desember 2023				Jumlah
	Pariwisata	Real Estat	Perdagangan dan Jasa	Eliminasi	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pendapatan dari					
Pelanggan Eksternal	1.010.077	131.464	141.623	(9.330)	1.273.834
Hasil					
Hasil Segmen	499.952	46.520	49.598	8.818	604.889
Beban Langsung tidak dapat Dialokasikan					(1.181.772)
Laba Bruto					696.951
Penghasilan Bunga					23.775
Penghasilan Lainnya					33
Kerugian Selisih Kurs - Bersih					(250.260)
Beban Penjualan					(28.331)
Beban Umum dan Administrasi					(551)
Beban Lain-lain					(98.246)
Jumlah Beban Usaha					(249.739)
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan					447.212
Beban Pajak Final					(16.981)
Beban Keuangan					(96.369)
Bagian Rugi Bersih					
Investasi Ventura Bersama					(763)
Bagian Rugi Bersih Entitas Asosiasi					24.016
Laba Sebelum Pajak					357.115
Beban Pajak Penghasilan					(115.809)
Laba Bersih Tahun Berjalan					241.306
Kerugian Komprehensif					
Lain Setelah Pajak					(87.595)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan					153.711
Kepentingan Non-pengendali					(6.117)
Aset					
Aset Segmen	2.064.720	1.329.696	213.880	(2.508.554)	1.099.742
Aset yang Tidak Dapat Dialokasi					2.643.678
Total Aset					3.743.420
Liabilitas					
Liabilitas Segmen	483.883	559.700	77.512	(397.132)	723.963
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasi					1.351.217
Total Liabilitas					2.075.180
Pengeluaran Modal					199.889
Penyusutan dan Amortisasi					92.306
Beban Nonkas selain Penyusutan dan Amortisasi Tidak Dapat Dialokasikan					18.726

Grup tidak menyajikan segmen geografis karena seluruh usaha Grup terkonsentrasi pada satu lokasi di Ancol, Jakarta Utara.

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

40. Perjanjian dan Informasi Penting Lainnya

- a. Berdasarkan Ketetapan Walikotamadya Jakarta Utara selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Wilayah Kotamadya Jakarta Utara No. 02/PPT/JU/111/95 tanggal 16 Maret 1995, tanah yang digunakan untuk jalan tol yang termasuk dalam HPL No. 1 milik Perusahaan adalah seluas 143.574 m² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp92.842. Selisih perhitungan nilai antara Ketetapan Walikotamadya Jakarta Utara tersebut dengan dana ganti rugi yang diterima Perusahaan yaitu sebesar Rp16.582 belum dicatat sebagai pendapatan Perusahaan, karena menurut manajemen Perusahaan:
1. Secara yuridis formal, sisa tagihan belum dapat dikategorikan sebagai piutang Perusahaan karena penentuan jumlah nilai seluruh ganti rugi dilakukan secara sepihak oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Pluit - Cilincing (*Harbour Road*) Kotamadya Jakarta Utara. Tidak ada perjanjian kesepakatan jumlah ganti rugi yang melibatkan Perusahaan selaku entitas usaha berbadan hukum, sehingga secara validitas, tidak ada dasar bagi Perusahaan untuk mengakui sisa tagihan ganti rugi sebagai piutang maupun pendapatan;
 2. Ditjen Binamarga dengan suratnya No. T.10.100.06.06/729 tanggal 22 September 1999 yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, memohon untuk mempertimbangkan agar sisa kekurangan pembayaran ganti rugi dapat diselesaikan tanpa ganti rugi, mengingat hal-hal berikut:
 - Kondisi keuangan negara saat ini dan ketersediaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cenderung semakin terbatas, dan
 - Prasarana publik yang dibangun di atas tanah Perusahaan juga memberikan manfaat yang sangat besar terhadap pengembangan proyek Perusahaan.

Berdasarkan surat Perusahaan No. 048/DIR-PJA/II/2002 tanggal 5 Februari 2002 kepada Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Perusahaan telah meminta realisasi atas kekurangan ganti rugi yang belum diterima. Sampai dengan tanggal laporan ini, penyelesaian selisih tersebut masih dalam proses.

- b. Pada tanggal 10 Agustus 2004, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS) untuk membangun, mengalihkan serta mengelola hak atas sarana *music stadium* di area Perusahaan seluas 39.000 m². PBCS memiliki hak pengelolaan atas proyek tersebut selama 25 tahun. Setelah masa perjanjian berakhir, PBCS akan mengembalikan pengelolaan kepada Perusahaan. PBCS memiliki hak opsi untuk memperpanjang masa pengelolaan maksimal 25 tahun atas persetujuan tertulis Perusahaan. Atas kerjasama tersebut, Perusahaan berhak mendapatkan imbalan sebesar 5% dari sewa jangka panjang dan 6% dari sewa jangka pendek yang merupakan bagian dari pendapatan kotor setiap tahunnya. Apabila PBCS terlambat melaksanakan penyerahan atas pembagian hasil transaksi penjualan maka dikenakan denda keterlambatan yang besarnya denda ditentukan berdasarkan rata-rata bunga deposito 1 (satu) tahun dari 3 (tiga) bank pemerintah terkemuka.

Pada tanggal 26 April 2007, melalui Akta Notaris No. 208 dari Sutjipto S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan telah memberikan persetujuan kepada PBCS untuk mengalihkan kerjasama kepada PT Wahana Agung Indonesia (WAI), sebagai perusahaan afiliasi PBCS, yang berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian pengalihan.

Pembagian pendapatan yang disetujui berdasarkan perjanjian adalah:

- Pendapatan yang bersumber dari sewa jangka panjang pihak ketiga yaitu sebesar 5% (lima persen) dari pendapatan bruto;
- Pendapatan yang bersumber dari sewa jangka pendek dari pihak ketiga yaitu 6% (enam persen) dari pendapatan bruto, dan
- WAI wajib melakukan pembayaran minimal ke Perusahaan sebesar Rp3.250 pada tahun pertama pengoperasian dan untuk tahun berikutnya dengan kenaikan minimal 5% (lima persen) per tahun, pembayaran tahun pertama sudah diterima.

Sehubungan keterlambatan pembangunan fisik sehingga mundurnya pelaksanaan pengoperasian proyek secara keseluruhan, maka dengan itikad baik Perusahaan, WAI dan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) sepakat membuat Perjanjian Pengalihan Kerjasama Pembangunan,

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pengalihan dan Pengoperasian "*Music Stadium*" dari WAI ke WAIP yang tertuang dalam perjanjian tertanggal 28 Agustus 2009, selanjutnya proyek tersebut akan dilakukan oleh WAIP dan dijadwalkan dapat diselesaikan tanggal 30 Nopember 2010 untuk proyek sisi utara dan 30 Juni 2011 untuk proyek sisi selatan. Pada tanggal 29 Agustus 2011 dilakukan addendum I (pertama) mengenai penyelesaian proyek di sisi Utara yang semula tanggal 30 Nopember 2010 menjadi 29 Agustus 2011 dan dari 30 Juni 2011 menjadi 29 Desember 2011 untuk sisi selatan. Pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan addendum II (kedua) mengenai penyelesaian proyek dari 29 Agustus 2011 untuk sisi utara dan 28 Desember 2011 untuk sisi selatan, menjadi 20 Desember 2012 untuk pengalihan proyek secara parsial dan 31 Juli 2013 untuk pengalihan proyek secara keseluruhan.

Kemudian Perusahaan melakukan berita acara serah terima secara parsial Pengalihan dan Pengoperasian Bangunan Music Stadium masing-masing melalui Berita Acara (BA) No. 021/DIRPJA/XII/2012 - 001/BA/DIR-WAIP/ XII/2012 dan No. 020/DIR-PJA/XII/2012 - No. 002/BA/DIRWAIP/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan secara keseluruhan Pengalihan dan Pengoperasian Bangunan Music Stadium masing-masing melalui Berita Acara (BA) No. 003/DIR-PJA/VII/2013 - No. 003/BA/DIR-WAIP/VII/2013 dan No. 004/DIR-PJA/VII/2013 - 004/BA/DIR-WAIP/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013, dengan ini perusahaan sepakat dan setuju untuk menyerahkan bangunan tersebut untuk dioperasikan oleh WAIP selama 25 tahun.

- c. Kelanjutan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta yang berada di kawasan Ancol mengalami penyesuaian dengan adanya perencanaan ulang penataan ruang kawasan reklamasi Pantai Utara Jakarta yang diatur melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, sehingga kemudian dilakukan penyesuaian terhadap izin-izin reklamasi yang sebelumnya telah diterbitkan dan diperoleh Perusahaan. Izin-izin reklamasi baru yang diperoleh Perusahaan setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud di atas menjadi sebagai berikut:
- Izin Prinsip Reklamasi Pulau I dengan Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1275/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 dengan luas 202,5 Ha, yang kemudian diperpanjang dengan Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 994/-1/794.2 tanggal 7 September 2015.
 - Izin Prinsip Reklamasi Pulau J dengan Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1276/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 dengan luas 316 Ha, yang kemudian diperpanjang dengan Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 995/-1.794.2 tanggal 7 September 2015.
 - Izin Prinsip Reklamasi Pulau K dengan Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1295/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 dengan luas 32 Ha, yang kemudian diperpanjang dengan Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 540/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014. Bahwa kemudian terhadap izin prinsip Pulau K tersebut telah terbit Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada Perusahaan pada tanggal 17 November 2015.
 - Izin Prinsip Reklamasi Pulau L dengan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1296/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 dengan luas 481 Ha.

Bahwa pada tanggal 26 September 2018 Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui jumpa pers di Balai Kota Jakarta secara resmi mengumumkan pemberhentian proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang kemudian diikuti dengan pencabutan izin-izin reklamasi yang telah diterbitkan sebelumnya, termasuk izin-izin reklamasi yang diperoleh Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas. Terhadap keputusan pemberhentian tersebut, kemudian Perusahaan menerima surat keputusan pencabutan terhadap izin-izin reklamasi yang dimiliki Perusahaan sebagai berikut:

1. Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1041/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 Perihal Pencabutan:
 - a) Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 No. 1276/-1.794.2 (Pulau J);
 - b) Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 No. 1296/-1.794.2 (Pulau L);
 - c) Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 No. 1275/-1.794.2 (Pulau I).

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1410 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur No. 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada Perusahaan.

Bahwa Perusahaan kemudian melakukan koordinasi intensif kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas rencana kerja Perusahaan kedepannya. Rencana kerja tersebut kemudian disampaikan oleh Perusahaan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Surat No. 011/DIR-PJA/EXT/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang rencana pengembangan ikon Dunia Fantasi dengan melakukan perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi melalui pembangunan wahana Ocean Fantasi yang terintegrasi dengan wahana Dunia Fantasi eksisting dan rencana perluasan kawasan rekreasi kawasan Taman Impian pada area Ancol Timur. Melalui surat yang sama, terhadap rencana kerja tersebut kemudian Perusahaan mengajukan permohonan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk dapat menerbitkan izin prinsip perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi seluas ± 35 Ha dan Kawasan Rekreasi Taman Impian pada area Ancol Timur seluas ± 120 Ha.

Bahwa berdasarkan persetujuan prinsip perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (DUFAN) seluas ± 35 Ha dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas ± 120 Ha berdasarkan surat Gubernur DKI Jakarta tanggal 24 Mei 2019 Nomor 462/-1.711.511 dan berdasarkan surat Perusahaan Nomor 010/DIR-PJA/EXT/III/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Permohonan Penerbitan Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan, pada tanggal 24 Februari 2020 diterbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (DUFAN) seluas ± 35 Ha dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas ± 120 Ha, yang pada intinya memberikan Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (DUFAN) seluas ± 35 Ha dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas ± 120 Ha kepada Perusahaan dengan ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan sebelum pelaksanaannya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut atas pengembangan kawasan ancil tersebut di atas dan dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada tanggal 13 September 2023 Perusahaan telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 13092310513100010 seluas 202.95 Ha yang diterbitkan melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan. Izin sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi Perusahaan untuk melanjutkan pengurusan izin pengembangan kawasan ancil selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Berikut ini adalah pihak yang signifikan terkait dengan perjanjian sewa dan *sponsorship*:

Entitas	Pihak	Periode Kontrak	Bagi Hasil	Nilai Kontrak	Pendapatan Mar 2024
PJA	PT Pertamina Gas	2014 - 2039	Penyewaan Lahan	84.675	847
PJA	PT Pertamina Gas	2016 - 2041	Penyewaan Lahan	79.660	797
PJA	PT Perusahaan Gas Negara	2015 - 2040	Penyewaan Lahan	79.660	797
PJA	PT Perusahaan Gas Negara	2013 - 2038	Penyewaan Lahan	44.357	444
TIJA	PT Fauna Land Ancol	2016 - 2035	Penyewaan Lahan	24.500	322
PJA	PT Indosat Tbk	2020 - 2025	Penyewaan Lahan	22.681	1.134
PJA	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	2019 - 2029	Penyewaan Lahan	41.500	1.038
PJA	PT Ketrosden Triasmitra	2012 - 2032	Penyewaan Lahan	7.331	76
TIJA	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2021 - 2024	Kerjasama Promosi dan Penjualan	7.128	980

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- e. Berikut ini adalah pihak yang signifikan terkait dengan perjanjian sewa berdasarkan persentase bagi hasil:

Entitas	Pihak	Periode Kontrak	Persentase Bagi Hasil	Pendapatan Maret 2024
TIJA	PT Djamanmas Pangan Nusa	2020 - 2025	6%	2.453
TIJA	PT Rekso Nasional Food	2019 - 2024	15%	1.398
TIJA	PT Arif Cipta Mandiri	2019 - 2023	20%	1.262
TIJA	PT Jimbaran Jaya	2003 - 2028	20%	956
TIJA	PT Seribu Satu Rasa	2023 - 2024	10%	892
TIJA	CV Nusa Prima Pangan	2022 - 2028	15%	855
TIJA	PT Multirasa Nusantara	2020 - 2025	16%	685
TIJA	Kalaha Tan	2018 - 2024	25%	571
TIJA	PT Prima Usaha Era Mandiri	2018 - 2025	10%	211
TIJA	Simpang Raya	2023 - 2024	11%	158

- f. Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan tanah/lahan di Kawasan Ancol untuk Penyelenggaraan Acara/Event dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Nomor X/DIR-PJA/XI/2021 pada tanggal 17 November 2021 dengan jangka waktu kerjasama penggunaan lahan dalam perjanjian tersebut selama 3 tahun, adapun penggunaan area obyek pemanfaatan dalam jangka waktu tersebut mengikuti kalender acara penyelenggaraan event sesuai penggunaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam jangka waktu tersebut.

41. Perkara Hukum

- a. Pada tanggal 25 Oktober 2022, PT Arkindo (selaku Penggugat) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tertanggal 25 Oktober 2022 ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap:
1. PT Taman Impian Jaya Ancol (PT TIJA) (selaku Tergugat I);
 2. PT PJA (selaku Tergugat II);
 3. PT Bank DKI c.q. Bank DKI Kantor Layanan Pintu Besar Selatan (selaku Turut Tergugat I);
 4. PT Jamkrida Jakarta (selaku Turut Tergugat).

Berdasarkan dokumen gugatan diperoleh informasi bahwa gugatan didasarkan pada kontrak Nomor: 001/P/DIR-TIJA/PP/VIII/21 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Masjid Apung Ancol ("Kontrak") dimana PT Arkindo (Penggugat) sebagai kontraktor/penerima pekerjaan dan PT TIJA (Tergugat) sebagai pemilik proyek/pemberi pekerjaan dengan jenis Kontrak turnkey (putar kunci) yang merupakan kontrak mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal kontraktor/penerima pekerjaan setuju untuk membangun proyek secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek siap dioperasikan. PT Arkindo (Penggugat) wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 15 Juni 2022.

Dalam pelaksanaannya sampai dengan batas waktu penyelesaian dan penyerahan pekerjaan sesuai Kontrak, PT Arkindo (Penggugat) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Masjid Apung Ancol secara penuh dan tuntas sampai dengan pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen) sesuai dengan batas waktu penyelesaian dan penyerahan pekerjaan yang diatur di dalam Kontrak, yaitu pada tanggal 15 Juni 2022, sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Kontrak PT TIJA melakukan pembatalan Kontrak terhadap PT Arkindo pada tanggal 15 Juni 2022 dengan segala konsekuensi akibat pembatalan Kontrak ditanggung oleh PT Arkindo sesuai ketentuan yang diatur di dalam Kontrak.

Bahwa kemudian gugatan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Oktober 2022 dan tercatat dengan nomor register perkara 709/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. panggilan sidang (relas) diterima masing-masing oleh PT TIJA dan PT PJA dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus pada tanggal 15 November 2022.

Pada tanggal 4 Desember 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus perkara 709/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat (PT Arkindo), kuasa hukum Tergugat I (PT TIJA), kuasa hukum Tergugat II (Perusahaan),

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

kuasa hukum Turut Tergugat I (PT Bank DKI c.q. Bank DKI Kantor Layanan Pintu Besar Selatan),
kuasa hukum Turut Tergugat II (PT Jamkrida Jakarta), yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara.

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelike Veerklard).
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi.

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelike Veerklard).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp1.153.000 (dalam rupiah penuh);

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, secara daring melalui e-court, PT Arkindo selaku Pembanding (d/h Penggugat) telah mengajukan permohonan pernyataan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.709/Pdt.G/2021/PN.JKT.Utr tersebut di atas, yang kemudian diberitahukan kepada PT Taman Impian Jaya Ancol selaku Terbanding I (d/h Tergugat I) dan Perusahaan selaku Terbanding II (d/h Tergugat II) pada tanggal 20 Desember 2023 dan kemudian tercatat dengan nomor register perkara No. 245/PDT/2024/PT DKI.

Pada tanggal 21 Maret 2024, kuasa hukum Perusahaan telah menerima Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor No. 245/PDT/2024/PT DKI tanggal 19 Maret 2024 melalui *e-court* yang pada pokoknya menginformasikan bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutus perkara nomor No. 245/PDT/2024/PT DKI yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 709/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 4 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (dalam rupiah penuh);

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara diperoleh informasi bahwa PT Arkindo telah mengajukan permohonan upaya hukum kasasi terhadap putusan nomor 245/PDT/2024/PT DKI juncto nomor 709/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr pada tanggal 4 April 2024.

Sampai dengan laporan ini disampaikan, perkara ini masih dalam tahap proses kasasi.

- b. Pada tanggal 5 April 2023, PT Mata Elang Internasional Stadium (PT MEIS) (selaku Penggugat) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT WAIP) (selaku Tergugat) dan Perusahaan (selaku Turut Tergugat). Berdasarkan dokumen gugatan diperoleh informasi bahwa gugatan didasarkan pada perjanjian sewa menyewa antara PT WAIP (pihak menyewakan) dan PT MEIS (pihak penyewa) sebagaimana yang dinyatakan dalam akta Notaris Edison Jingga, SH. No. 78 tanggal 21 Maret 2012 tentang Perjanjian Sewa Menyewa yang telah dibatalkan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 18 Agustus 2015 juncto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 629/PDT/2016/PT.DKI tanggal 16 Desember 2016 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2430 K/Pdt/2018 tanggal 30 Oktober 2018 juncto Putusan Peninjauan Kembali nomor 547 PK/Pdt/2018 tanggal 24 Agustus 2020.

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Bahwa kedudukan Perusahaan dalam gugatan ini adalah karena adanya perjanjian *Build Transfer Operate* (BTO) antara Perusahaan dengan PT WAIP, dimana setelah selesai masa pembangunan proyek BTO, PT WAIP memiliki hak mengoperasikan proyek BTO tersebut, termasuk menyewakan kepada pihak ketiga, dalam perkara ini pihak ketiga dimaksud adalah PT MEIS.

Bahwa kemudian gugatan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 April 2023 dan tercatat dengan nomor register perkara 225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. Relas panggilan sidang diterima oleh Perusahaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus tanggal 13 April 2023.

Pada tanggal 20 September 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus perkara 225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. yang diucapkan dalam sidang terbuka yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan segala bentuk perbuatan Tergugat yang dilakukan terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian materiel dalam perkara aquo adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan mengembalikan kerugian materiel dengan cara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp45.000.000.000 (dalam rupiah penuh);
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan atas perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp595.000 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Pada tanggal 29 September 2023, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta, PT WAIP telah mengajukan pernyataan permohonan upaya hukum banding terhadap putusan perkara 225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 September 2023 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2023, melalui *e-court*, kuasa hukum Perusahaan telah menerima *scan* putusan perkara nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 September 2023 yang kemudian diikuti dengan pemberitahuan memori banding dan berkas memori banding yang diajukan oleh PT WAIP selaku Pembanding (d/h Tergugat I) pada tanggal 19 Oktober 2023 yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan penyerahan kontra memori banding oleh Perusahaan selaku Turut Terbanding (d/h Turut Tergugat) pada tanggal 26 Oktober 2023. Bahwa terhadap upaya hukum banding tersebut kemudian tercatat dengan nomor register 1195/PDT/2023/PT DKI.

Pada tanggal 4 Januari 2023, kuasa hukum Perusahaan telah menerima Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 1195/PDT/2023/PT DKI tanggal 20 Desember 2023 melalui *e-court* yang pada pokoknya menginformasikan bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutus perkara nomor 1195/PDT/2023/PT DKI yang amar putusannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 September 2023;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 (dalam rupiah penuh);

Bahwa kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara diperoleh informasi bahwa PT WAIP telah mengajukan

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

pernyataan permohonan upaya hukum kasasi terhadap putusan nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. juncto nomor 1195/PDT/2023/PT DKI pada tanggal 10 Januari 2023.

Sampai dengan laporan ini disampaikan, perkara ini masih dalam tahap proses kasasi.

42. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan

Manajemen risiko Perusahaan adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh personil Perusahaan sebagai salah satu dasar dalam penentuan strategi, dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa atau keadaan yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan korporasi dan mengelola risiko tersebut agar masuk dalam *risk appetite* (risiko yang dapat diterima) Perusahaan untuk menjamin secara rasional pencapaian tujuan Perusahaan.

Dalam melaksanakan manajemen risiko, Perusahaan melakukan identifikasi, penaksiran, respon, pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan atas risiko Perusahaan.

1. Risiko keuangan utama yang harus dikelola adalah risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar yang terdiri dari risiko suku bunga dan risiko mata uang asing.

i. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah kerugian yang timbul dari kegagalan pelanggan memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut (rincian umur piutang usaha). Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 piutang usaha Perusahaan tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu.

Perusahaan mengelola risiko kredit dengan cara melakukan seleksi pelanggan, bank dan institusi keuangan serta penetapan kebijakan cara pembayaran penjualan dan pengalihan risiko dengan penutupan asuransi, mengusahakan penyandang dana untuk pelanggan.

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum risiko kredit Perusahaan atas instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian:

	31 Maret 2024		31 Desember 2023	
	Nilai Tercatat	Exposure Maksimum	Nilai Tercatat	Exposure Maksimum
Aset Keuangan				
Kas dan Setara Kas	282.505	282.505	411.446	411.446
Piutang Usaha	41.402	39.843	62.237	62.237
Piutang Lain-lain	5.369	5.369	26.077	26.077
Investasi Jangka Panjang Lainnya	128.936	128.936	128.936	128.936
Aset Lain-lain	10.497	10.497	10.497	10.497
Jumlah Aset Keuangan	458.212	456.653	628.696	628.696

Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan rekening bank dan piutang dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

Grup telah mencatat penyisihan penurunan nilai atas penurunan piutang usaha yang telah jatuh tempo (Catatan 4).

Aset keuangan yang belum jatuh tempo yang terindikasi risiko kredit terutama dari kas dan setara kas dan piutang usaha.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang signifikan atas penempatan dana di bank, karena penempatan dana hanya ditempatkan pada bank-bank yang berpredikat baik.

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Manajemen berpendapat bahwa piutang usaha yang belum jatuh tempo tidak memiliki risiko kredit yang signifikan, karena piutang usaha atas penjualan unit properti, dijamin dengan properti yang sama, dimana jumlah exposure risikonya lebih rendah dari nilai jaminannya, sedangkan piutang usaha nonproperti berasal dari pelanggan-pelanggan yang memiliki rekam jejak yang baik.

ii. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo.

Eksposur risiko likuiditas berupa kesulitan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas keuangan yang harus dibayar dengan kas atau aset keuangan lainnya. Perusahaan diharapkan dapat membayar seluruh liabilitasnya sesuai dengan jatuh tempo kontraktual. Agar dapat memenuhi liabilitas tersebut, Perusahaan harus menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

Tabel berikut merangkum liabilitas keuangan Perusahaan per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 pada saat jatuh tempo berdasarkan kontrak pembayaran yang tidak didiskontokan:

Liabilitas	31 Maret 2024				
	Tidak ditentukan	≤ 1 Tahun	> 1 - 5 tahun	Biaya Emisi	Nilai Tercatat
Utang Usaha dan Lain-lain	--	39.071	--	--	39.071
Beban Akrual	211.000	--	--	--	211.000
Utang Bank	--	230.599	474.720	(7.181)	698.138
Utang Obligasi	--	--	65.368	(105)	65.263
Jaminan Pelanggan dan Deposit lainnya	15.689	--	--	--	15.689
Liabilitas Sewa	--	4.958	84.685	--	89.643
Jumlah	226.689	274.628	624.773	(7.286)	1.118.804

Liabilitas	31 Desember 2023				
	Tidak ditentukan	≤ 1 Tahun	> 1 - 5 tahun	Biaya Emisi	Nilai Tercatat
Utang Usaha dan Lain-lain	--	27.589	--	--	27.589
Beban Akrual	218.363	--	--	--	218.363
Utang Bank	--	41.280	624.720	(7.885)	658.115
Utang Obligasi	--	65.432	149.568	(219)	214.781
Jaminan Pelanggan dan Deposit lainnya	13.397	--	--	--	13.397
Liabilitas Sewa	--	3.126	97.079	--	100.205
Jumlah	231.760	137.427	871.367	(8.104)	1.232.450

iii. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing didefinisikan sebagai penurunan nilai aset/pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas/pengeluaran yang disebabkan fluktuasi nilai tukar mata uang asing tersebut.

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik.
 Kebijakan Pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya proyek-proyek yang telah maupun akan diperoleh Grup. Risiko ini merupakan risiko yang bersifat sistemik (*systematic risk*) dimana bila risiko ini terjadi maka akan mempengaruhi secara negatif seluruh *variable* yang terlibat, sehingga membuat kinerja menurun, bahkan diversifikasipun belum mampu menghilangkan risiko ini.

3. Nilai Wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	31 Maret 2024		31 Desember 2023	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
Kas dan Bank	282.505	282.505	411.446	411.446
Piutang Usaha	41.402	39.843	62.237	62.237
Aset Lain-lain	31.232	31.232	34.595	34.595
Total	355.139	353.580	508.278	508.278
Liabilitas Keuangan				
Utang Usaha dan Lain-lain	39.071	39.071	27.589	27.589
Utang Bank	698.138	698.138	658.115	658.115
Beban Akrua	211.000	211.000	218.363	218.363
Total	948.209	948.209	904.067	904.067

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya mendekati nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

43. Manajemen Permodalan

Tujuan dari Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko.

Grup menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Konsisten dengan perusahaan lain dalam industri, Perusahaan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: Liabilitas neto dibagi modal yang disesuaikan. Liabilitas neto merupakan total liabilitas (sepaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. Modal yang disesuaikan terdiri dari seluruh komponen ekuitas (meliputi modal saham dan saldo laba).

Rasio liabilitas terhadap modal yang disesuaikan pada 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Jumlah Liabilitas	1.965.174	2.075.180
Dikurangi Kas dan Setara Kas	(282.505)	(411.446)
Liabilitas Bersih	1.682.669	1.663.734

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
 Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>31 Maret 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.609.117	1.647.160
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	<u>104,57%</u>	<u>101,01%</u>

44. Informasi Tambahan untuk Arus Kas

Perusahaan memiliki transaksi non kas untuk 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Penambahan Investasi Jangka Panjang Lainnya Melalui Reklasifikasi Investasi pada Entitas Asosiasi	4.436	9.454
	--	265.669
Jumlah	<u>4.436</u>	<u>275.123</u>

Tabel dibawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, sebagai berikut:

	31 Maret 2024			
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Arus Kas</u>	<u>Perubahan Non Kas</u>	<u>Saldo Akhir</u>
Utang Bank	658.115	39.319	704	698.138
Utang Obligasi	214.781	(149.600)	82	65.263
Liabilitas Sewa	100.205	(2.856)	(7.706)	89.643
	31 Desember 2023			
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Arus Kas</u>	<u>Perubahan Non Kas</u>	<u>Saldo Akhir</u>
Utang Bank	901.704	(242.870)	(719)	658.115
Utang Obligasi	214.543	--	238	214.781
Liabilitas Sewa	101.654	(12.376)	10.927	100.205

45. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim. Laporan keuangan konsolidasian interim telah diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 26 April 2024.